



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018

Evaluasi Capaian Pembangunan dan Relevansi Dokumen Perencanaan

Provinsi Banten

**Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas**

Tim Pelaksana EKPD

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018: Evaluasi Capaian Pembangunan dan Relevansi Dokumen Perencanaan

Penanggungjawab

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas

Ketua Pelaksana

Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas

Tim Penulis

Vidhyandika Djati Perkasa (CSIS)

Hady Sutjipto (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

Editor

Pradipha Panduswanto (Dit. PEPPD Bappenas)

Bambang Triyono (Dit. PEPPD Bappenas)

ISBN: 978-623-90297-8-4

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas

Isi dan materi yang ada dalam buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

Kata Pengantar

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) merupakan salah satu kegiatan evaluasi *ex-post* tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappenas bekerjasama dengan professional, peneliti, dan akademisi di 34 provinsi. Pada tahun ini, evaluasi fokus pada capaian, relevansi, dan efektivitas RKP 2017.

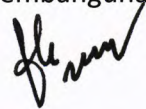
Laporan evaluasi capaian dan relevansi di setiap provinsi menjelaskan hasil capaian makro ekonomi dan dan RKP 2017 di 34 provinsi, serta hasil relevansi antara permasalahan dan tantangan pembangunan daerah dan perencanaan daerah dalam RKPD Provinsi 2018. Dalam laporan juga menuliskan warna daerah yang berisi cerita khas daerah. Hasil evaluasi juga menunjukkan target pembangunan kewilayahan yang belum dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rekomendasi spesifik daerah dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi daerah.

Selain mendapatkan hasil capaian RKP 2017, laporan ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan memberi masukan untuk menyusun perencanaan pembangunan berikutnya. Laporan ini juga dapat dimanfaatkan oleh publik untuk mendapatkan informasi capaian pembangunan di 34 provinsi.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan EKPD 2018. Perbaikan metodologi dan kolaborasi yang lebih produktif akan dilaksanakan pada evaluasi kedepan untuk kualitas evaluasi dan manfaat yang lebih besar.

Terima kasih.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan



Taufik Hanafi



PROVINSI BANTEN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan Dan Manfaat	4
1.3 Batasan Evaluasi.....	4
METODOLOGI	5
2.1 Metode Evaluasi.....	5
2.1.1 Analisis Gap.....	6
2.1.2 Analisis Dokumen.....	6
2.2 Ruang Lingkup.....	7
2.2.1 Evaluasi capaian RKP di daerah.....	7
2.2.2 Evaluasi Relevansi Dokumen Perencanaan Daerah	9
ANALISIS	11
3.1 Evaluasi Capaian	12
3.1.1 Indikator Makro	13
3.2. Analisis Relevansi	37
PENUTUP	47
Simpulan dan Saran	48
LAMPIRAN	52
Tabel Analisis Relevansi RKPD dan RPJMD	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional.....	2
Gambar 1.2 Tema RKP 2017-2019	3
Gambar 1.3 Alur Pelaksanaan EKPD 2018	4
Gambar 2.1 Analisis Utama EKPD 2018 Laporan 34 Provinsi.....	7
Gambar 3.1 Peta Administrasi Provinsi Banten	12
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten 2015-2017 (Persen).....	14
Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten per Sektor Tahun 2017 (persen)	16
Gambar 3.4 Tingkat Kemiskinan (Maret) Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)	19
Gambar 3.5 Garis Kemiskinan (Maret) Provinsi Banten 2015-2017 (Rp/Kapita/Bulan)	20
Gambar 3.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Banten 2015-2017 (Maret).....	21
Gambar 3.7 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Banten 2015-2017 (Maret)	22
Gambar 3.8 Tingkat Kemiskinan Kab/kota di Provinsi Banten tahun 2017 (persen).....	23
Gambar 3.9 Jumlah Penduduk Miskin 2015-2017	23
Gambar 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) Provinsi Banten 2015-2017 (Persen).....	24
Gambar 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/kota di Provinsi Banten tahun 2017 (persen)	25
Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan di Provinsi Banten 2017	26
Gambar 3.13 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten.....	28
Gambar 3.14 Indeks Pembangunan Manusia Kab/kota di Provinsi Banten Tahun 2017 ...	28
Gambar 3.15 Gini Ratio Provinsi Banten 2015-2017	30
Gambar 3.16 Angka Melek Huruf Provinsi Banten 2015-2017 (Persen).....	31
Gambar 3.17 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Banten 2015-2017 (Tahun).....	32
Gambar 3.18 Angka Prevelensi Kontrasepsi Suatu cara Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)	33
Gambar 3.19 Jumlah Puskesmas Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Banten 2015-2017	34
Gambar 3.20 Akses Air Minum Layak Provinsi Banten 2015-2017 (Persen).....	35
Gambar 3.21 Akses Sanitasi Layak Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)	35
Gambar 3.22 Kepemilikan Akte (40persen) Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)	36
Gambar 3.23 Produksi Padi Provinsi Banten 2015-2017 (Ton).....	37
Gambar 3.24 Redistribusi Tanah Provinsi Banten 2015-2017	38
Gambar 3.25 Capaian Indikator Industri Provinsi Banten 2015-2017	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tema RKP 2017-2019	10
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2017 (Persen).....	15
Tabel 3.2	Struktur Ekonomi dan Struktur Tenaga Kerja Provinsi Banten Tahun 2017	17
Tabel 3.3	Sektor Unggulan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten	18



1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siklus pembangunan secara umum melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan di Indonesia mengacu kepada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, ditujukan untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Secara spesifik, Undang-undang SPPN menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian dalam tahapan perencanaan yang ditujukan untuk menilai hasil ataupun capaian terhadap pelaksanaan perencanaan sebagai masukan untuk perencanaan di tahap berikutnya.

Gambar 1.1 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional



Perkuatan peran evaluasi semakin jelas dan krusial melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam PP tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mendapat mandat untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan mengevaluasi kebijakan

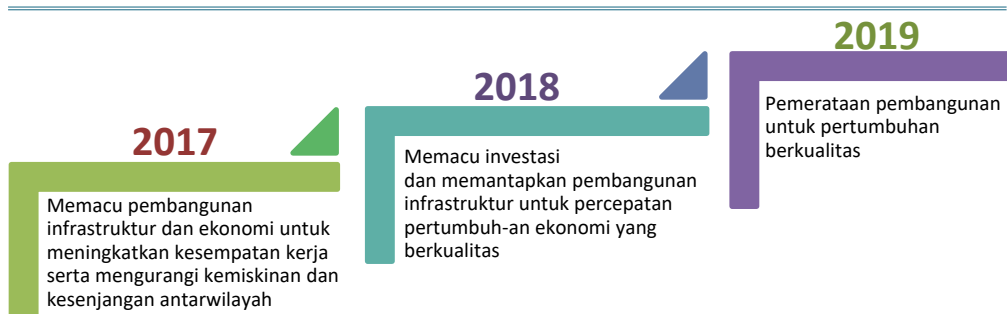
tahun berjalan dalam rangka menentukan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. Pembangunan nasional dalam perspektif undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengacu pada konsep pembangunan nasional tersebut, evaluasi pembangunan nasional yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas meliputi evaluasi pembangunan sektoral (pusat) dan evaluasi pembangunan daerah.

Evaluasi pembangunan pusat dan evaluasi pembangunan daerah bersifat saling menguatkan dan komplementer. Dari sisi subjek evaluasi, keduanya dapat dipandang sebagai bentuk evaluasi yang berbeda, namun dari sisi objek evaluasi kedua evaluasi tersebut boleh jadi memiliki objek yang sama. Dalam konteks pengentasan kemiskinan misalnya, boleh jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki program dan kebijakan yang berbeda. Namun kebijakan tersebut boleh jadi memiliki objek yang sama, yaitu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, evaluasi pembangunan pusat dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) memandang penting untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah atau EKPD. Kegiatan ini merupakan evaluasi *ex-post* terhadap RKP 2017, yang mengusung tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Walaupun merupakan evaluasi *ex-post* terhadap RKP 2017, EKPD tidak saja melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam RKP, tetapi juga kebijakan daerah yang mendukung sasaran RKP.

Kegiatan EKPD dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan peneliti dan profesional serta didukung oleh akademisi daerah, Bappeda Provinsi dan pihak-pihak lain yang relevan. Keterlibatan banyak pihak diharapkan memperkaya hasil analisis dan meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi. Hasil EKPD dapat menjadi rekomendasi dalam penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya khususnya yang terkait dengan pembangunan kewilayahan.

Gambar 1.2 Tema RKP 2017-2019



Kegiatan EKPD Tahun 2018 fokus pada 4 (empat) hal, yaitu: capaian, relevansi, efisiensi dan efektivitas. Terkait laporan EKPD di 34 Provinsi, evaluasi

fokus pada capaian pembangunan nasional di daerah dan relevansi dokumen perencanaan daerah dalam rangka menjawab tantangan pembangunan daerah.

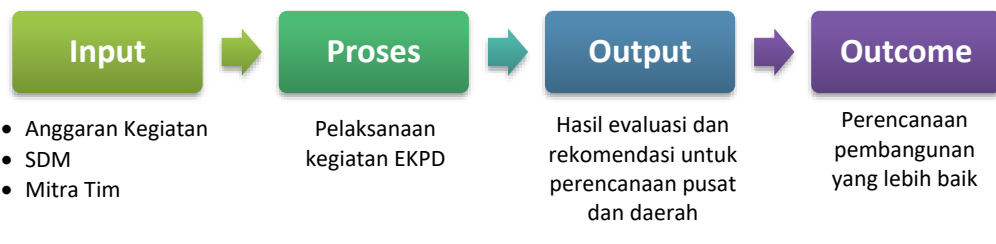
1.2 Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari pelaksanaan EKPD Tahun 2018 di 34 Provinsi adalah:

1. Mengevaluasi capaian pembangunan nasional di daerah
2. Mengevaluasi relevansi dokumen perencanaan daerah

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi ini adalah sebagai bahan masukan maupun rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Gambar 1.3 Alur Pelaksanaan EKPD 2018



1.3 Batasan Evaluasi

Evaluasi di 34 Provinsi merupakan evaluasi capaian dan evaluasi relevansi. Evaluasi capaian bersifat *ex-post* terhadap RKP 2017 di daerah sesuai tema RKP 2017 yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Evaluasi capaian dilakukan terhadap indikator sasaran RKP 2017. Mengingat ketersediaan data, evaluasi capaian dibatasi untuk indikator sasaran RKP 2017 yang datanya tersedia hingga ke tingkat Provinsi. Terkait evaluasi relevansi, batasan evaluasi adalah pada dokumen perencanaan tahunan Provinsi, khususnya RKP 2018.



2 METODOLOGI

2.1 Metode Evaluasi

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 34 Provinsi Tahun 2018 merupakan evaluasi *ex-post* yang dititikberatkan pada evaluasi capaian dan relevansi. Metode evaluasi yang digunakan adalah analisis gap dan analisis dokumen. Terkait pengumpulan data, metode yang dilakukan dalam EKPD terdiri atas beberapa metode antara lain metode kualitatif dan kuantitatif yang terkait kebijakan/program/kegiatan untuk dilakukan penilaian.

2.1.1 Analisis Gap

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi pembangunan nasional, analisis gap dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai). Gap dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain analisis gap merupakan langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Dalam laporan ini, evaluasi capaian yang digunakan membandingkan capaian daerah dengan:

- a. Target RKP 2017 (jika ada)
- b. Capaian tahun sebelumnya
- c. Capaian nasional

Analisis gap tidak hanya membandingkan capaian dan target namun juga ditindaklanjuti secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi permasalahan ataupun keberhasilan atas capaian pembangunan yang didasarkan pada intervensi kebijakan/regulasi/penganggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

2.1.2 Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan bentuk dari penelitian kualitatif dimana peneliti menginterpretasikan dokumen dalam rangka mendalami informasi terkait topik penilaian yang menjadi fokus evaluasi (Bowen, 2009)¹. Evaluasi relevansi EKPD 2018 dilaksanakan dengan menganalisis dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD) tahun 2017 mengenai prioritas dan program daerah dan membandingkannya dengan permasalahan atau tantangan daerah. Perbandingan

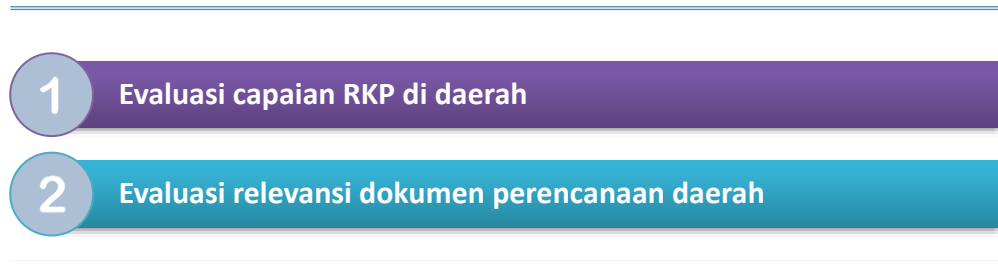
¹ Glenn A. Bowen, (2009) "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 Issue: 2, pp.27 40, <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

ini dilakukan untuk menilai apakah dokumen peencanaan daerah telah disusun dalam rangka menjawab permasalahan spesifik daerah tersebut.

2.2 Ruang Lingkup

Untuk laporan EKPD 2018 di 34 Provinsi, analisis evaluasi fokus pada dua elemen sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Analisis Utama EKPD 2018 Laporan 34 Provinsi



2.2.1 Evaluasi capaian RKP di daerah

Evaluasi capaian meliputi evaluasi capaian makro ekonomi dan prioritas nasional RKP di daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan data referensi lain: nasional, antar waktu, dan target dokumen perencanaan. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa evaluasi capaian dapat disebut evaluasi pengukuran kinerja yang dilakukan dengan analisis gap yaitu membandingkan capaian dengan target. Dalam praktiknya, tidak semua indikator makro dan prioritas nasional mempunyai target. Oleh karena itu, analisis gap didekati dengan data referensi lain yaitu capaian tahun sebelumnya ataupun capaian nasional. Lokus analisis dilakukan pada **level Provinsi dan antar kabupaten/kota** dalam Provinsi tersebut.

a. Lingkup Indikator yang Dianalisis

Indikator Makro Ekonomi

Indikator makro ekonomi yang akan dianalisis dalam EKPD 2018 terdiri dari lima indikator makro utama, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Tingkat Kemiskinan;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka;

4. Indeks Gini;
5. IPM.

Indikator Sasaran Prioritas Nasional RKP 2017

Indikator prioritas nasional di daerah yang akan dianalisis dalam EKPD 2018 terdiri dari:

1. Prioritas Nasional Kesehatan yang terdiri atas indikator: a) Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi suatu cara; dan b) Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
2. Prioritas Nasional Pendidikan yang terdiri atas indikator: a) Rata-rata lama sekolah; dan b) Angka melek huruf
3. Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK yang terdiri atas indikator: a) Pertumbuhan Industri; dan 2) Kontribusi dalam PDRB
4. Prioritas Nasional Antar Kelompok Pendapatan yaitu indicator Kepemilikan akta lahir
5. Prioritas Nasional Reforma Agraria yang terdiri atas indikator: a) Bidang tanah yang redistribusi; dan b) Sertifikat HAT (Hak Atas Tanah)
6. Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan yang terdiri atas indikator: a) Produksi Padi; dan b) Produksi Daging Sapi
7. Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman yang terdiri atas indikator: a) Akses air minum layak; dan b) Akses sanitasi layak

b. Tahapan Analisis

Untuk setiap indikator, tahapan analisis yang dilakukan adalah:

1. Melakukan analisis deskriptif kuantitatif level Provinsi dengan membandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (5 tahun terakhir), target yang ditetapkan (Target RKP/RKPD), dan target nasional.
2. Melakukan analisis deskriptif kuantitatif dengan membandingkan capaian antar kabupaten/kota dengan capaian tahun sebelumnya (data antar waktu), capaian Provinsi dan nasional untuk tahun yang sama.
3. Apabila capaian kurang bagus, tim evaluasi menjelaskan **faktor penyebab** capaian turun/ tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Apabila capaian baik, tim evaluasi menjelaskan **faktor pendukung** capaian, yaitu kebijakan/program/kegiatan/ proyek pemerintah pusat dan daerah yang menjadi pendorong capaian indikator. Dalam analisis dapat

menggunakan data pendukung lain yang terkait dengan Prioritas Nasional sebagai alat bantu analisis.

5. Menyajikan rekomendasi kebijakan operasional berdasarkan hasil evaluasi.
6. Pelaksana utama evaluasi capaian adalah tim evaluasi. Pada tahap 3-5, Bappeda dan akademisi membantu memperkaya analisis dalam konsolidasi wilayah. Selain memperkaya analisis, akademisi juga membuat tulisan singkat terkait isu-isu spesifik di masing-masing Provinsi.

2.2.2 Evaluasi Relevansi Dokumen Perencanaan Daerah

Dokumen perencanaan daerah disusun untuk menyelesaikan permasalahan daerah dan mendukung pembangunan nasional. Perbedaan karakteristik dan tantangan daerah berimplikasi pada perencanaan daerah yang spesifik dalam menjawab tantangan tersebut dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Analisis deskriptif mengenai keterkaitan dokumen perencanaan daerah dan tantangan daerah tersebut, dilakukan melalui evaluasi keterkaitan permasalahan/tantangan pembangunan daerah dengan prioritas dan program daerah yang ditetapkan. Tahapan dalam melaksanakan evaluasi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tim evaluasi menelaah RKPD 2018 daerah bersangkutan. Hasil **telaah** disusun dengan format tabel dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Tim evaluasi menelaah permasalahan dan mengisi satu permasalahan pada kolom (2). Permasalahan dimaksud dapat diambil dari Bab II RKPD 2018. Permasalahan juga dapat berdasarkan hasil analisis pada evaluasi capaian dan literatur ilmiah lain.
 - b. Tim evaluasi mengisi sasaran dalam RKPD (kolom 3) yang berkaitan dengan permasalahan (kolom 2).
 - c. Tim evaluasi mengisi prioritas daerah (kolom 4) yang berkaitan dengan permasalahan. Prioritas daerah dapat dilihat pada Bab IV RKPD.
 - d. Tim evaluasi mengisi program prioritas (kolom 5) yang merupakan penjabaran prioritas daerah (kolom 4) yang dapat menjawab

- permasalahan (kolom 3). Program prioritas daerah terdapat pada Bab V RKPD 2018.
- e. Tim evaluasi mengisi indikator program prioritas daerah (kolom 6), yang merupakan tolak ukur keberhasilan program prioritas daerah (kolom 5).
 - f. Lakukan langkah a hingga e untuk setiap permasalahan pembangunan daerah yang diidentifikasi.
 - g. Apabila tidak termuat program prioritas daerah, dapat mengacu pada program daerah pada lampiran RKPD.
 - h. Pelaksana utama evaluasi relevansi adalah tim evaluasi. Bappeda dan PTN membantu memepertajam hasil evaluasi saat konsolidasi.

Tabel 2.1 Tema RKP 2017-2019

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas*	Indikator Program Prioritas*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1
2
3
...

2. Tim Evaluasi menyusun **analisis singkat** berdasarkan hasil telaah RKPD dan RPJMD yaitu mengenai permasalahan yang telah dan belum dijabarkan dalam dokumen perencanaan daerah.
3. Tim Evaluasi menyusun **rekomendasi** berdasarkan hasil telaah dan analisis mengenai:
 - a. Prioritas daerah yang perlu dilanjutkan pada Tahun 2020
 - b. Prioritas daerah baru yang perlu muncul pada Tahun 2020

Intervensi pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan daerah sesuai kewenangan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.



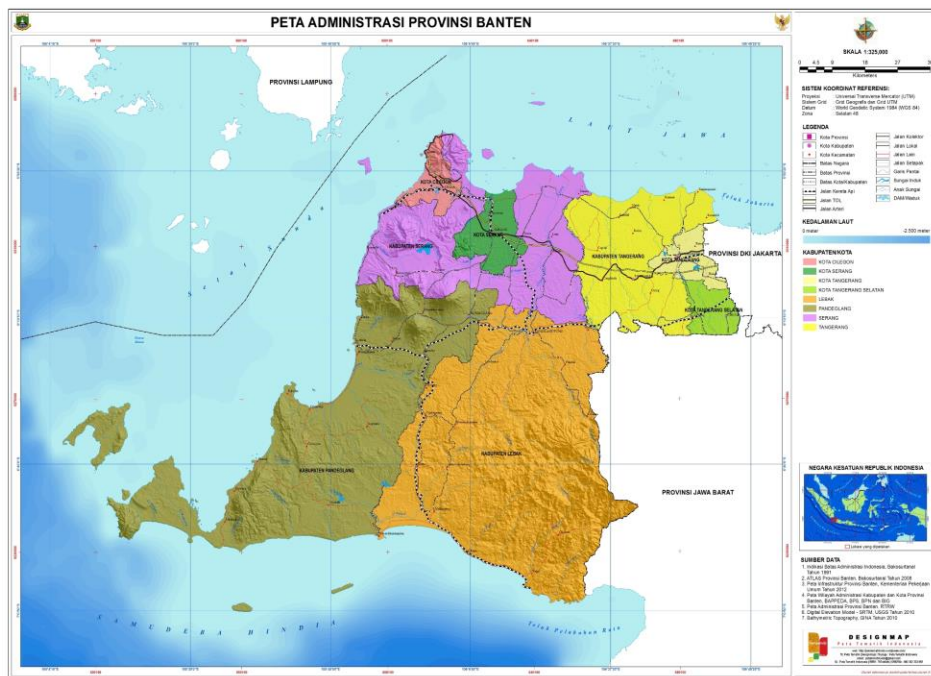
3

ANALISIS

3.1 Evaluasi Capaian

Banten adalah sebuah Provinsi di wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi Wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-undang No 23 tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Provinsi Banten terletak di antara 5°7'50" Lintang Selatan dan 105°1'11"- 106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa.

Gambar 3.1. Peta Administrasi Provinsi Banten



Sumber: Bappeda Provinsi Banten

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara, misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu, Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera, bila dikaitkan dengan posisi geografis, dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah

Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang) merupakan wilayah penyangga bagi Kota Jakarta.

Secara administratif Provinsi Banten terdiri dari 4 Kabupaten, 4 Kota, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa dengan batas wilayah:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Selat Sunda
Sebelah Timur	: DKI Jakarta dan Jawa Barat

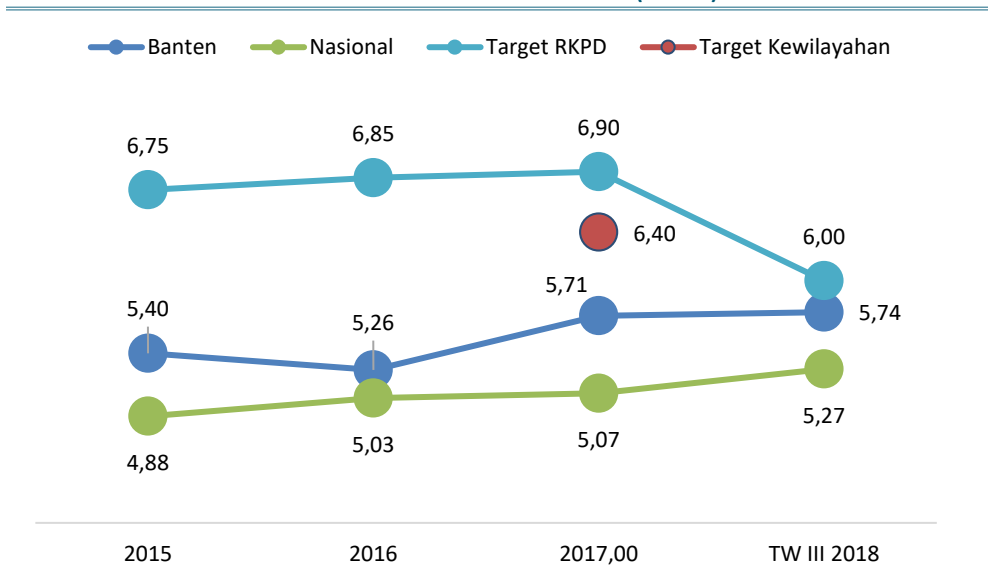
Secara umum, ada beberapa indikator makro dan prioritas nasional terpilih dimana Provinsi Banten telah menunjukkan hasil yang bagus antara lain pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat kemiskinan, indeks gini dan pendidikan. Sedangkan hasil yang kurang bagus terkait upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka dimana masih di bawah capaian nasional dan untuk tahun 2017 juga belum menunjukkan perbaikan dibandingkan kondisi di tahun 2016. Selain itu pencapaian reforma agraria dan antarkelompok pendapatan juga masih di bawah angka pencapaian nasional. Pencapaian yang belum maksimal terdapat di bidang kesehatan, perumahan dan permukiman dan percepatan pertumbuhan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

3.1.1 Indikator Makro

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Banten selama 2015-2018 berfluktuasi dengan kecenderungan naik dan selalu berada di atas capaian nasional, meski di bawah target Provinsi. LPE Provinsi Banten berturut 5,40 persen (2015) 5,26 persen (2016) 5,71 persen (2017) dan 5,74 persen (TW III-2018). Angka-angka tersebut lebih tinggi dari pada capaian LPE nasional yang hanya berkisar 5 persen dan dibawah dari pada target Provinsi sebesar 6 – 7 persen, dan lebih rendah dari target kewilayahan 2017 yang ditetapkan secara nasional sebesar 6,40 persen.

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)



Sumber: BPS

Ekonomi Provinsi Banten tahun 2017 tumbuh 5,71 persen (*yoy*) atau jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 di level 5,26 persen (*yoy*). Hal tersebut sesuai dengan perkiraan sepanjang tahun 2017 dimana Provinsi Banten dinilai memasuki fase *recovery* dan akan tumbuh lebih kuat dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi secara umum ditopang oleh pertumbuhan konsumsi Pemerintah, investasi, serta kinerja ekspor. Sementara itu, konsumsi rumah tangga meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi namun masih di level yang lebih rendah dari tahun 2016. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terutama didorong oleh industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan transportasi dan pergudangan. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi serta sektor akomodasi dan makan minum juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Sektor yang menahan pertumbuhan antara lain pertanian, pertambangan, dan jasa keuangan.

Secara lebih detail, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten meningkat signifikan pada tahun 2017. Kota Tangerang Selatan yang merupakan kota satelit dari Provinsi Banten tumbuh 7,43 persen, tertinggi di Provinsi Banten pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang merupakan pertumbuhan terendah di Provinsi Banten yaitu sebesar 5,21 persen dan semua kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.

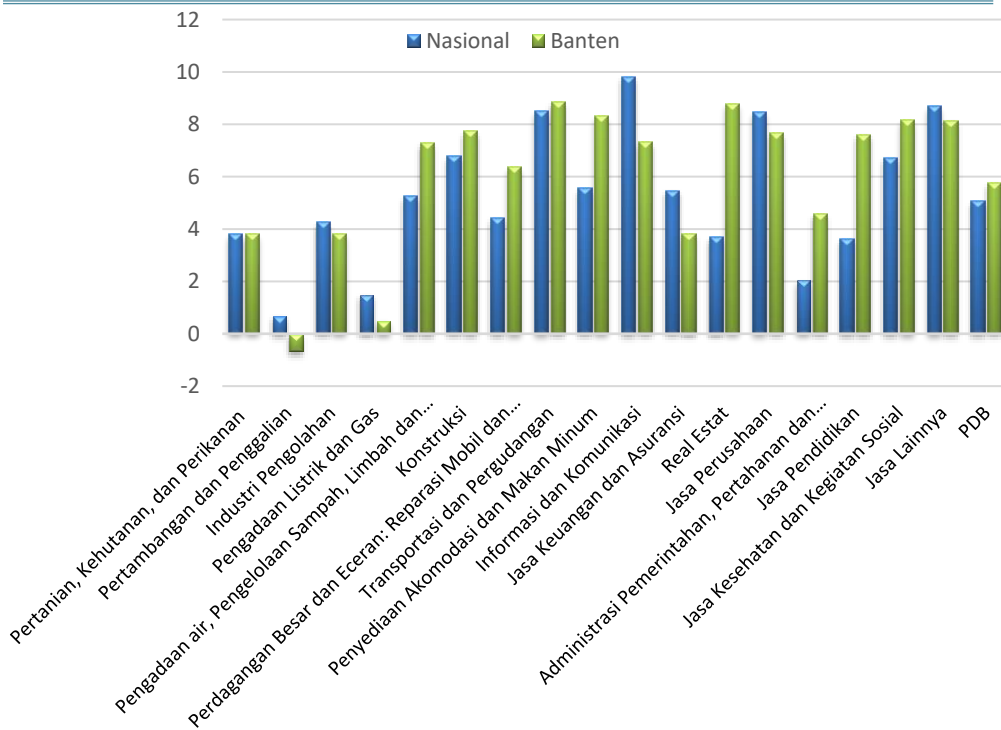
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2017 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
1	Kab. Pandeglang	5,81	5,52	6,05
2	Kab. Lebak	6,20	5,87	5,84
3	Kab. Tangerang	5,60	5,36	5,84
4	Kab. Serang	5,09	5,10	5,21
5	Kota Tangerang	5,37	5,31	5,91
6	Kota Cilegon	4,75	5,05	5,59
7	Kota Serang	6,35	6,28	6,41
8	Kota Tangerang Selatan	7,25	6,85	7,43
	Provinsi Banten	5,45	5,28	5,71
	Nasional	4,88	5,03	5,07

Sumber: BPS Provinsi Banten

Menurut sektor ekonominya, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan merupakan sektor dengan *share* terbesar tahun 2015 – 2017 di Provinsi Banten. Pada tahun 2017 sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan (8,87 persen), Real Estate (8,76 persen) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,16 persen) sedangkan sektor pertambangan dan penggalian tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,68 persen. Dibandingkan dengan kinerja nasional per sektor, tiga sektor yang mencatat perbedaan pertumbuhan tertinggi adalah sektor properti/real estate, jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan. Secara proporsi, ekonomi Provinsi Banten terhadap Pulau Jawa sebesar 6,96 persen atau sekitar nasional 4,01 persen secara nasional.

Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten per Sektor Tahun 2017 (persen)



Sumber: BPS

Bila dilihat dari struktur ekonomi dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, penyerapan tenaga kerja tidak selamanya berbanding lurus dengan *share* sektor pada struktur ekonominya. Sektor industri menyerap paling banyak tenaga kerja (1,25 juta) atau menyumbang 24,54 persen dari total tenaga kerja dengan kontribusi ekonomi sebesar 31,6 persen dan diikuti tenaga kerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,20 juta) yang menyerap 23,71 persen dari total tenaga kerja dan menyumbang 14,55 persen kontribusi ekonomi. Sektor ketiga yang paling banyak menyumbang tenaga kerja adalah jasa kemasyarakatan (900 ribu) dan menyumbang 17,73 persen total tenaga kerja tetapi hanya berkontribusi sebesar 8,63 persen ke struktur ekonomi. Jelas disini ada permasalahan produktivitas rendah, sehingga perlu penyiapan kualifikasi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Meskipun sumbangan sektor pertanian terbilang kecil terhadap struktur ekonomi tetapi sektor ini tidak dapat ditinggalkan karena merupakan *buffer* untuk industri dan perdagangan. Rendahnya produktivitas di sektor pertanian juga disebabkan oleh maraknya alih fungsi lahan ke pembangunan kawasan industri dan permukiman secara masif.

Meski sumbangan sektor industri cukup besar terhadap struktur ekonomi tetapi tidak lepas dari masalah. Beberapa sektor industri sepatu akan tutup karena permasalahan kompetisi dan harga buruh yang relatif lebih mahal dibandingkan negara lain seperti Vietnam. Dengan pemutusan kontrak industri alas kaki, perlu adanya intervensi khusus. Untuk industri lain, tingginya ketergantungan bahan baku impor terutama petrokimia dan besi baja juga sangat berdampak ketika terjadi depresiasi nilai tukar mempengaruhi daya saing industri di Provinsi Banten.

Tabel 3.2 Struktur Ekonomi dan Struktur Tenaga Kerja Provinsi Banten Tahun 2017

Lapangan Usaha	Struktur (persen)		Jumlah
	Ekonomi	Tenaga Kerja	
1 Pertanian	4,99	13,31	676 ribu
2 Pertambangan	0,71	0,74	37 ribu
3 Industri	31,6	24,54	1,25 juta
4 Listrik, Gas, dan Air	2,18	0,4	21 ribu
5 Konstruksi	11,12	5,62	266 ribu
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14,55	23,71	1,20 juta
7 Pengangkutan dan Komunikasi	14,97	7,38	376 ribu
8 Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	11,56	6,56	333 ribu
9 Jasa Kemasyarakatan	8,63	17,73	900 ribu
Jumlah	100	100	5,08 Juta

Sumber: BPS Provinsi Banten

Bila dilihat secara lebih mendalam potensi atau sektor unggulan di tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Banten terlihat ada beberapa kegiatan utama (lihat tabel 3.2). Dari tabel tersebut terlihat potensi sektor pariwisata, manufaktur, perikanan dan jasa menyebar secara merata di hampir semua kabupaten dan kota di Provinsi Banten tersebut.

Tabel 3.3 Sektor Unggulan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten

No	Kawasan	Kegiatan Utama
1	Kabupaten Pandeglang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Jasa, Pertambangan, Agribisnis, Agrowisata, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Industri Pengolahan, Industri Kerajinan, Pertambangan Mineral.
2	Kabupaten Lebak	Pariwisata, Perikanan, Jasa, Pertambangan, Agribisnis, Agrowisata, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan, Agro Industri, Perikanan Tangkap, Industri Kerajinan dan Pertambangan Mineral
3	Kabupaten Tangerang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan, dan Perikanan Tangkap
4	Kabupaten Serang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan, Perikanan Tangkap, Industri Kerajinan dan Pertambangan Mineral.
5	Kota Tangerang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Peternakan, Jasa, Industri Pengolahan, dan Industri Kerajinan.
6	Kota Cilegon	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perikanan Tangkap, Kehutanan, Perdagangan, Jasa, Pertambangan, Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan dan Pertambangan Mineral.
7	Kota Serang	Pariwisata, Perikanan, Perikanan Tangkap, Perdagangan, Jasa, Peternakan dan Industri Kerajinan.
8	Kota Tangerang Selatan	Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Agro Wisata, Peternakan dan Industri Pengolahan.

Sumber: Bappeda Provinsi Banten

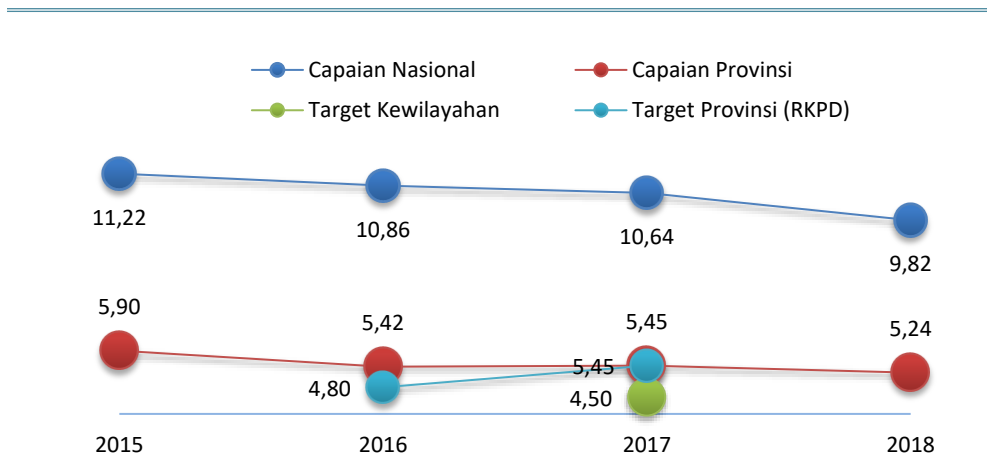
Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten selama 2015-2018 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dan selalu berada di bawah capaian nasional, meski di atas target Provinsi. Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten berturut 5,90 persen (2015) 5,42 persen (2016) 5,45 persen (2017) dan 5,24 persen (Maret 2018). Pencapaian tersebut lebih rendah daripada capaian tingkat kemiskinan nasional yang hanya

berkisar 11 – 10 persen namun masih di atas target Provinsi sebesar 4,8 – 4,45 persen, dan lebih tinggi dari target kewilayahan 2017 yang ditetapkan secara nasional sebesar 4,50 persen.

Persentase kemiskinan pada Maret 2018 adalah 9,82 persen, ini pertama kalinya Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit. Sementara persentasenya pada Maret 2017 itu 10,64 persen.

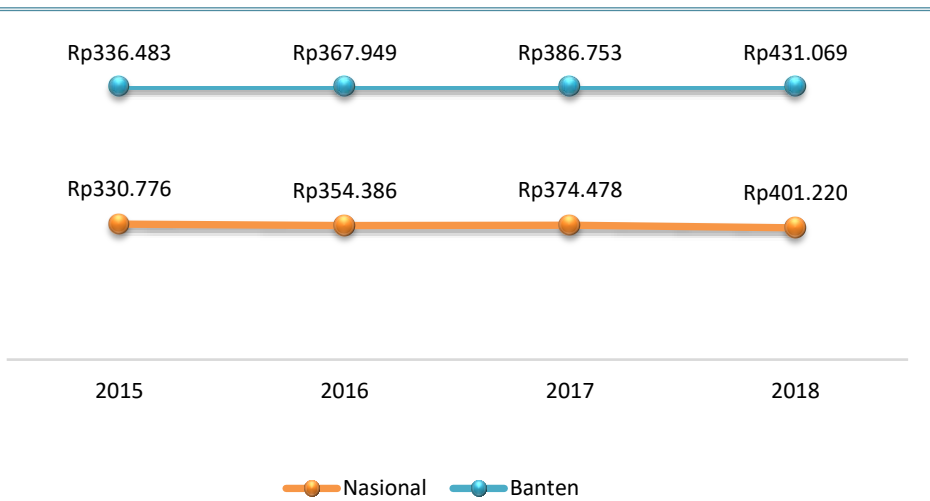
Gambar 3.4 Tingkat Kemiskinan (Maret) Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Banten

Nilai capaian maupun target tingkat kemiskinan Provinsi Banten mengalami penurunan, hal ini menunjukkan Pemerintah telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan dengan program-program yang ada. Akan tetapi nilai kemiskinan kemiskinan masih terbilang cukup tinggi. Selain itu tingginya kemiskinan di Provinsi Banten sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tinggi persentase penduduk miskin di Provinsi Banten diakibatkan oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha produktif yang meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal. Selain itu tingginya kemiskinan Provinsi Banten diakibatkan oleh pertumbuhan sektor ekonomi yang cenderung padat modal dan dikuasai investor tertentu.

Gambar 3.5 Garis Kemiskinan (Maret) Provinsi Banten 2015-2017 (Rp/Kapita/Bulan)



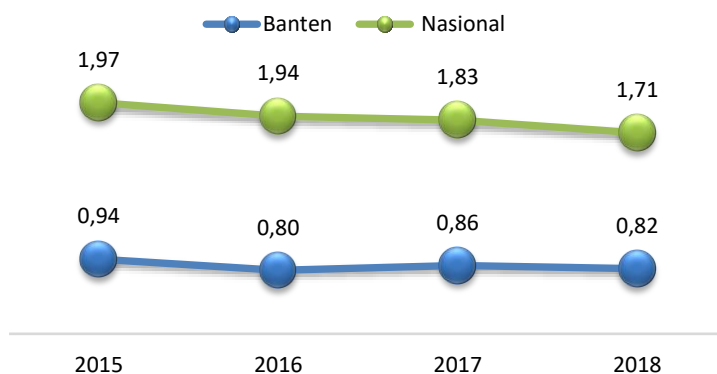
Sumber: BPS Provinsi Banten

Garis kemiskinan di Provinsi Banten berada di atas garis kemiskinan nasional. Tren garis kemiskinan di Provinsi Banten dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan sejalan dengan tren nasional. Lebih jauh lagi, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Banten cenderung stagnan. Terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan di tahun 2017 berlawanan dengan tren jumlah penduduk miskin nasional yang semakin menurun.

Salah satu pemicu naiknya tingkat kemiskinan adalah kenaikan garis kemiskinan dari Rp 386 ribu per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 407 ribu per kapita per bulan pada September 2017. Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditas nonmakanan. Pada September 2017, komoditas makanan menyumbang 70,93 persen pada Garis Kemiskinan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 3.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Banten 2015-2017 (Maret)

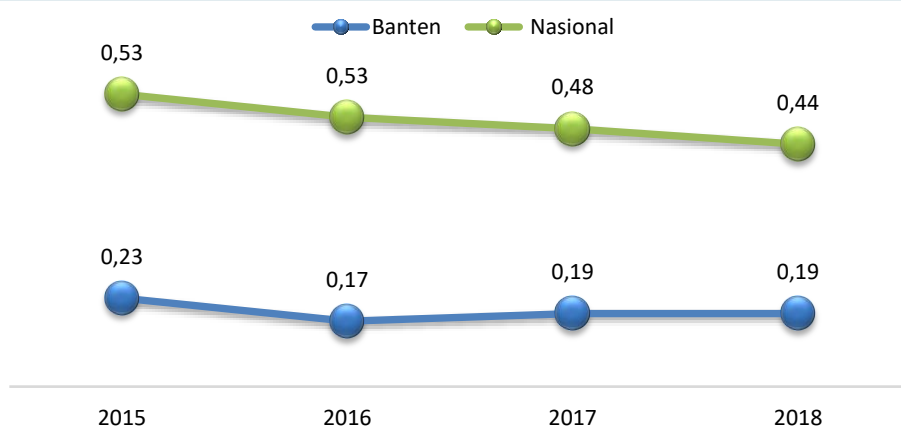


Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada periode Maret 2015–Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional pada Maret 2015 adalah 1,97 terus menurun sampai Maret 2018 menjadi 1,71. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,53 pada Maret 2015 menjadi 0,44 pada maret 2018. Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Banten mengalami fluktuasi yang cenderung menurun.

Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan (GK). Adapun penurunan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin mengecil.

Gambar 3.7 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Banten 2015-2017 (Maret)

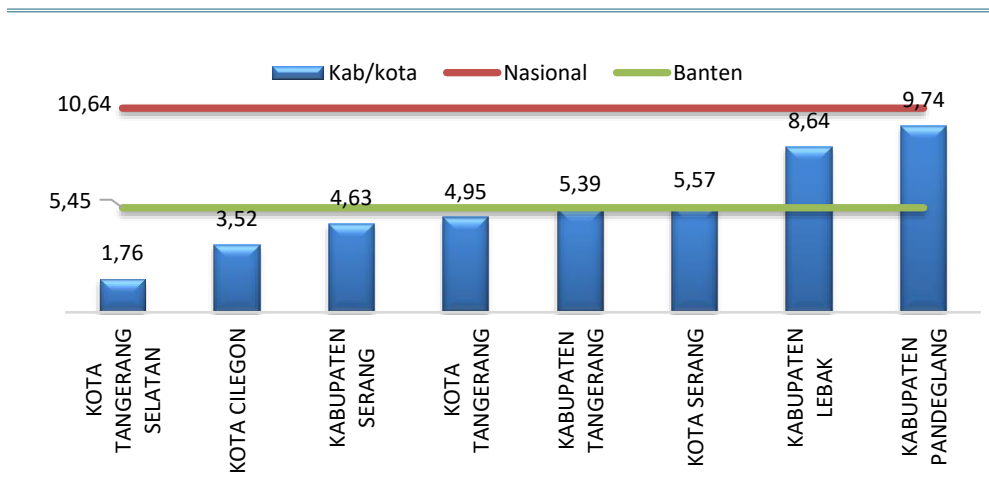


Sumber: BPS Provinsi Banten

Tingkat kemiskinan per kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 dapat dilihat pada grafik di bawah. Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat kemiskinan 1,76 persen merupakan kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Banten dan bahkan terendah di seluruh Indonesia. Sedangkan Kabupaten Pandeglang adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 9,74 persen. Angka ini masih lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional. Selain Kabupaten Pandeglang, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak dan Kota Serang juga berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Banten. Laporan BPS Provinsi Banten, domisili penduduk miskin di Provinsi Banten, sekitar tiga dari empat penduduk miskin berdiam di wilayah kabupaten dan daerah sentra pertanian menjadi kantong kemiskinan.

Penilaian ini didasarkan kepada kemiskinan tertinggi secara historis selalu terdapat di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kedua daerah ini adalah sentra pertanian di Banten, sehingga kemiskinannya pasti terkait dengan sektor pertanian. Oleh karena itu, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Banten, dibutuhkan program yang terintegrasi dan lintas sektor. Dalam hal ini, termasuk dengan melibatkan secara penuh, berbagai pemangku kepentingan di bidang pertanian.

Gambar 3.8 Tingkat Kemiskinan Kab/kota di Provinsi Banten tahun 2017 (persen)

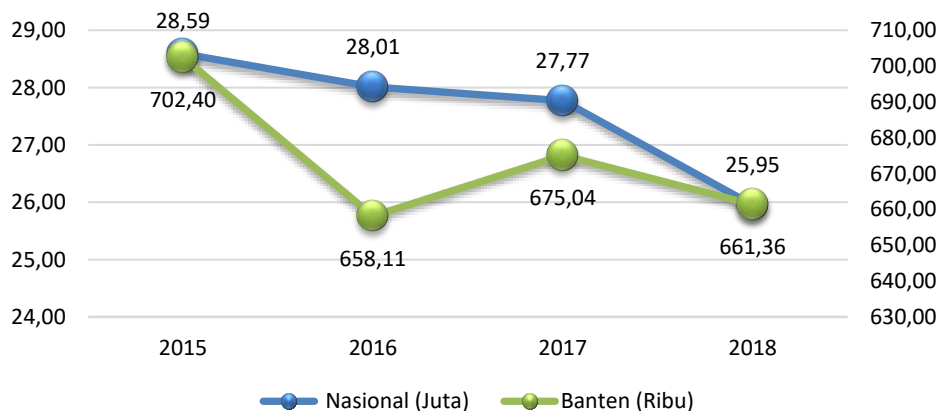


Sumber: BPS Provinsi Banten

Dalam penghitungannya, BPS menggunakan Garis Kemiskinan sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Batas ini bersifat relatif dan dapat berubah setiap periodenya. Secara umum, sejak 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Jumlah

penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 berjumlah 28,59 juta jiwa terus menurun mencapai 25,95 juta jiwa pada Maret 2018.

Gambar 3.9 Jumlah Penduduk Miskin 2015-2017

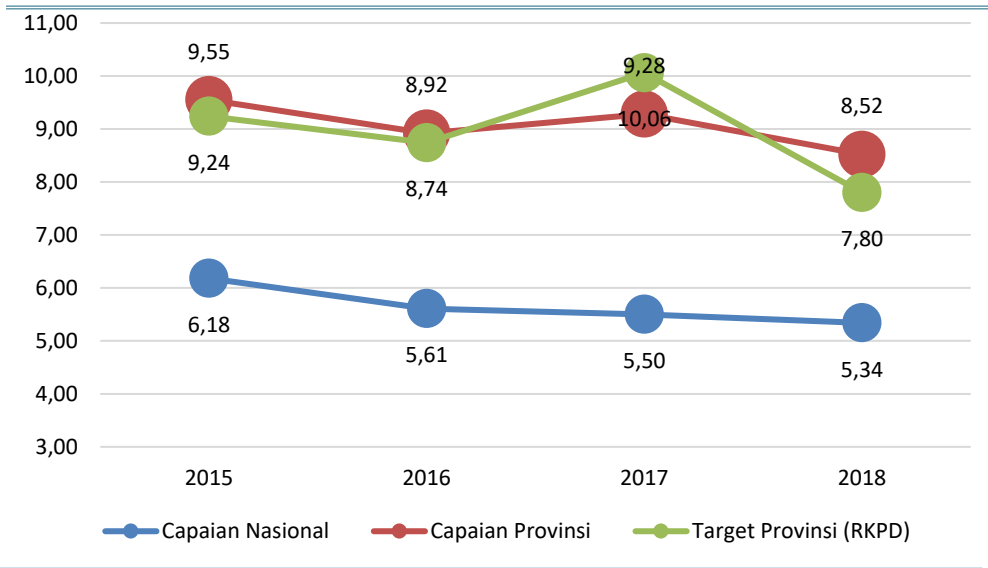


Sumber: BPS Provinsi Banten

Tingkat Pengangguran Terbuka

Terkait dengan lapangan kerja, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten mencapai 9,28 persen di tahun 2017. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,92 persen. Dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional tahun 2017 (5,5 persen), Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Penduduk usia kerja Banten (penduduk usia 15 tahun ke atas), yang memasuki pasar kerja selama tiga tahun terakhir ini telah meningkat lebih dari dua pertiganya. Kondisi ini terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang memberikan gambaran mengenai besarnya persentasi penduduk usia kerja yang termasuk dalam bagian angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Banten sendiri terus bertambah, dari 5,69 juta orang menjadi 6,09 juta pada Februari 2018.

Gambar 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)

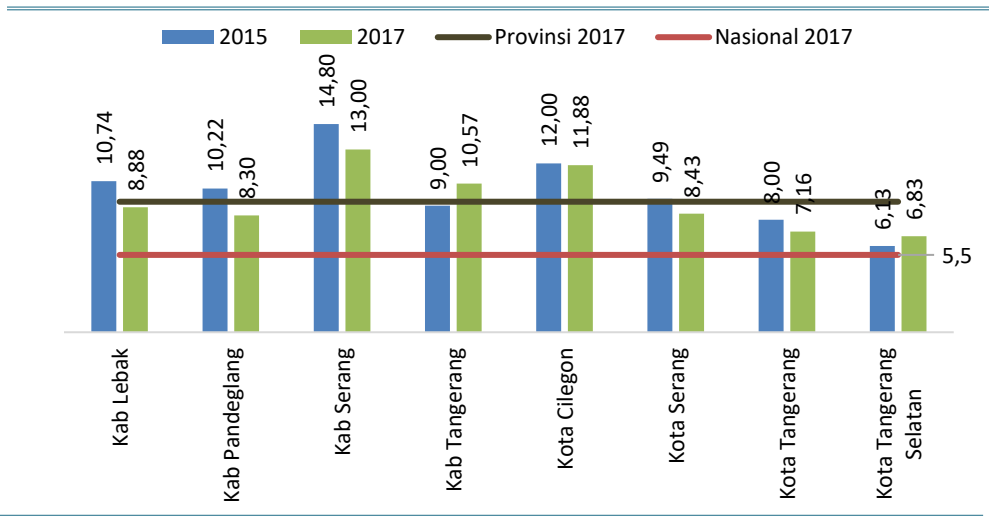


Sumber: BPS Provinsi Banten

Analisis pada tingkat kabupaten/kota memperlihatkan Kota Tangerang Selatan sebagai kota dengan tingkat pengangguran terendah yaitu 6,83 persen sedangkan Kabupaten Serang merupakan yang tertinggi mencapai 13 persen. Semua kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran di atas angka nasional. Selain Kabupaten Serang, tingkat pengangguran Kota Cilegon (11,88 persen) dan Kabupaten Tangerang (10,57 persen) berada di atas tingkat pengangguran Provinsi Banten. Tingginya angka TPT Banten terutama disebabkan oleh banyaknya pengangguran di Kabupaten Tangerang yang berjumlah 174.546 orang. Hal ini setidaknya terlihat pada Agustus 2017, dimana sekitar sepertiga dari jumlah penganggur tinggal dan menetap di sana.

Hal yang menarik tingginya TPT berada di kabupaten/kota yang berbasis industri. Kondisi ini diperkirakan merupakan dampak penduduk yang bermigrasi ke Banten untuk mencari pekerjaan dengan ketrampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Posisi strategis Provinsi Banten sebagai penghubung pulau Jawa-Sumatera dan terdapatnya sejumlah industri besar dan sedang seharusnya merupakan modal untuk mengurangi TPT.

Gambar 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/kota di Provinsi Banten tahun 2017 (persen)

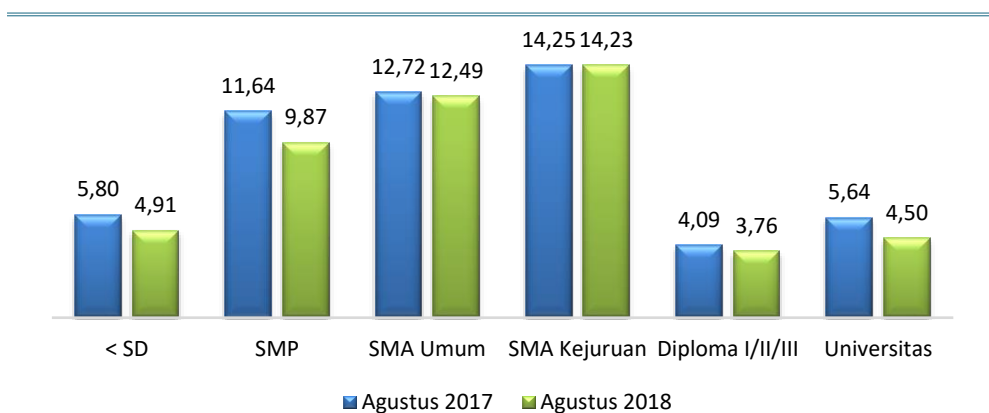


Sumber: Sakernas, diolah

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Lowongan pekerjaan yang tersedia selalu disertai dengan kualifikasi Pendidikan. Di Pasar kerja, kualifikasi pendidikan sangat menentukan untuk memperoleh pekerjaan.

Dilihat dari komposisi pencari kerja menurut pendidikan, pencari kerja di Provinsi Banten didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Persentase pencari kerja yang berpendidikan rendah (SMP ke bawah) maupun tinggi (diploma dan sarjana) meningkat dibanding tahun lalu. Sementara itu, persentase pengangguran yang mengenyam pendidikan menengah (SMA/SMK) mengalami kenaikan dari 48,17 persen (Agustus 2017) menjadi 52,81 persen (Agustus 2018).

Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan di Provinsi Banten 2017



Sumber: BPS Provinsi Banten

Keterbatasan pendidikan menyebabkan penduduk berpendidikan rendah sulit untuk mampu bersaing di pasar kerja. Mereka hanya dapat memperoleh pekerjaan tanpa kualifikasi Pendidikan, seperti pedagang asongan, pembantu rumah tangga dan lainnya. Keterbatasan dengan pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rendahnya tingkat pengangguran SD ke bawah disebabkan karena angkatan kerja berpendidikan SD tidak mempunyai daya tawar sehingga bersedia mengerjakan apa saja. Mereka yang lulusan SD ke bawah juga banyak terserap di lapangan kerja tetapi umumnya hanyalah pekerja informal dan bukan new entry.

Angkatan kerja yang berpendidikan SMP dan SMA sederajat sepertinya sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena harus bersaing dengan angkatan kerja berpendidikan SD dalam mendapatkan pekerjaan tanpa kualifikasi pendidikan. Mereka pun kalah bersaing dengan angkatan kerja yang berpendidikan lebih tinggi (diploma dan universitas). Dilihat dari jenjang pendidikan, lulusan SMA Kejuruan paling banyak yang berstatus sebagai pencari kerja (14,23 persen). Kondisi ini sama seperti tahun sebelumnya dimana pencari kerja terbanyak adalah lulusan SMK.

TPT penduduk berpendidikan diploma dan universitas turun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Lulusan perguruan tinggi lebih mudah terserap di pasar kerja, hanya 3,76 persen lulusan Diploma dan 4,50 persen lulusan Sarjana yang menganggur. TPT penduduk berpendidikan tinggi lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk berpendidikan rendah maupun menengah. Keadaan ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja berpendidikan tinggi memiliki daya saing dalam memperoleh pekerjaan.

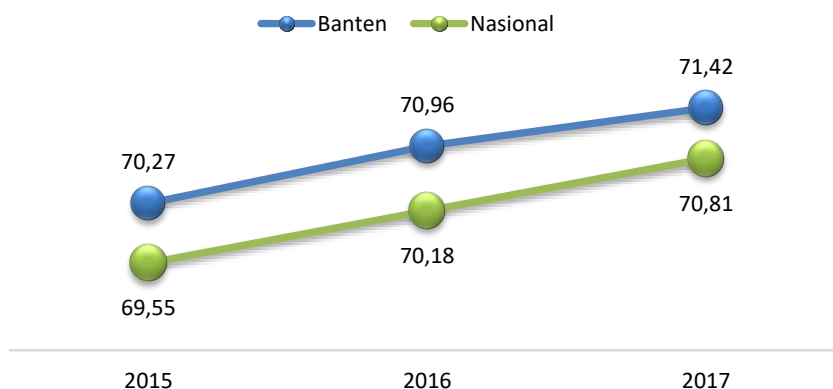
Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Banten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2017, IPM Banten telah mencapai 71,42 atau meningkat 0,46 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 70,96. Tren peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Banten sejalan dengan tren nasional. Pada 2017, IPM Provinsi Banten mencapai 71,42 atau diatas IPM nasional sebesar 70,81. Pada tahun 2017, status pembangunan manusi di Banten berada pada level atau kategori “Tinggi”. Status tersebut masih sama dengan tahun 2016.

Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan yang terendah untuk komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Adapun nilai atau capaian UHH, Harapan Lama Sekolah (HLS), RLS, dan Pengeluaran

per Kapita Disesuaikan, masing-masing 69,49 tahun, 12,78 tahun, 8,53 tahun, dan 11,7 juta rupiah.

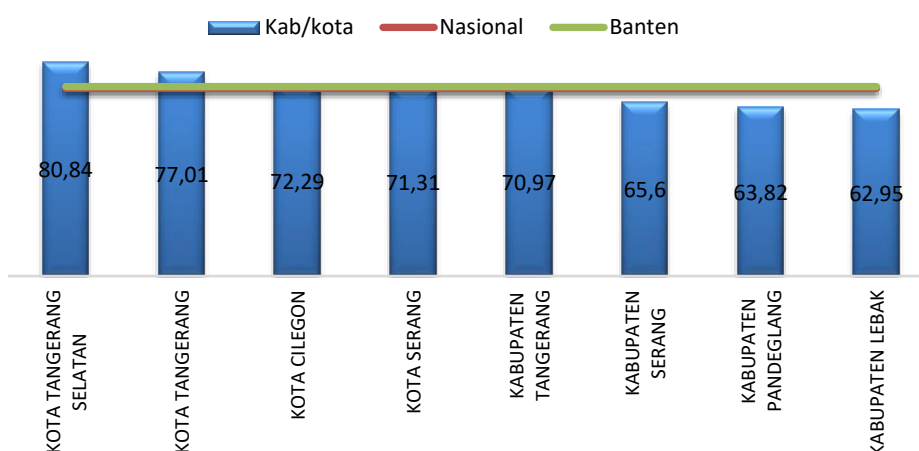
Gambar 3.13 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten



Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang memiliki IPM tertinggi di Provinsi Banten yaitu 80,84. Di sisi lain, Kabupaten Lebak merupakan kabupaten dengan angka IPM terendah sebesar 62,95. Adapun IPM 5 dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten berada di bawah IPM Provinsi yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Serang.

Gambar 3.14 Indeks Pembangunan Manusia Kab/kota di Provinsi Banten Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir antara 64,04 tahun (Kabupaten Pandeglang) hingga 72,16 tahun (Kota Tangerang Selatan). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar

antara 11,92 tahun (Kabupaten Lebak) hingga 14,39 tahun (Kota Tangerang Selatan), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 6,20 tahun (Kabupaten Lebak) hingga 11,77 tahun (Kota Tangerang Selatan). Adapun, Pengeluaran perkapita disesuaikan berkisar antara 8,4 juta rupiah per tahun (Kabupaten Pandeglang) hingga 15,3 juta per tahun (Kota Tangerang Selatan).

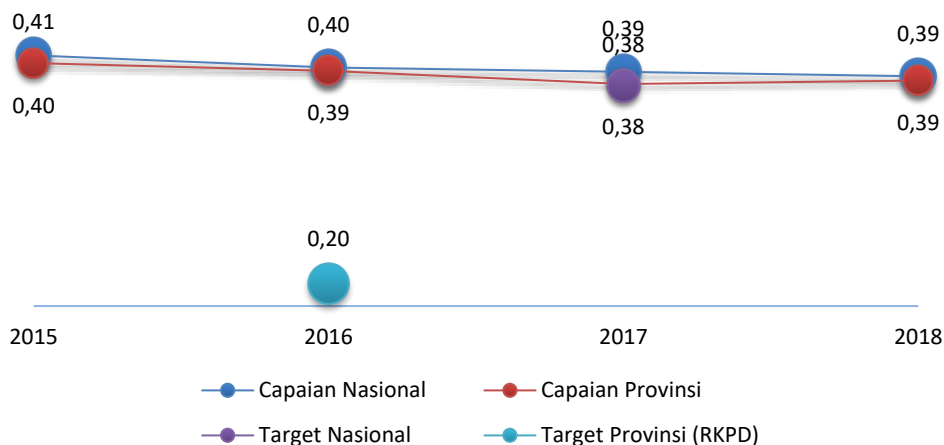
Perbedaan letak geografis, keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta perbedaan dalam struktur ekonomi dan ketenagakerjaan antar daerah, akan menghasilkan capaian pembangunan manusia yang berbeda pada setiap daerah. Di samping itu, adanya perbedaan strategi dan fokus pembangunan, serta keberhasilan berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, juga menentukan tinggi rendahnya dan kecepatan capaian pembangunan manusia pada setiap daerah.

Indeks Gini

Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2016, indeks gini Provinsi Banten turun menjadi 0,379 di 2017. Hal ini menunjukkan kenaikan pada pemerataan di Provinsi Banten. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan indeks gini nasional yang mencapai 0,391. Berdasarkan daerah tinggal, indeks gini di daerah perkotaan sebesar 0,380 lebih besar dibandingkan indeks gini untuk daerah perdesaan. Artinya ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan lebih rendah.

Yang perlu dicermati adalah adanya ketimpangan pendapatan perkapita yang cukup signifikan antara daerah kawasan industri (Kota Cilegon) dengan nonindustri (Kabupaten Lebak dan Pandeglang). Faktor sosial budaya juga berpengaruh terhadap ketimpangan ini salah satunya adalah perbedaan cara hidup penduduk di Kabupaten Pandeglang dan Lebak dengan daerah lainnya dimana sebagian besar penduduk memproduksi dan mengonsumsi barang-barang mereka sendiri. Permasalahan masyarakat di Provinsi Banten yaitu *culture*, keterisolasian, aksesibilitas.

Gambar 3.15 Indeks Gini Provinsi Banten 2015-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten

Selain indeks gini, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah presentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ketimpangan tinggi jika persentase kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada tahun 2017, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 17,95 persen yang berarti Banten berada pada kategori ketimpangan rendah.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2017 diantaranya adalah:

- Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa pengeluaran per kapita per bulan kelompok 40 persen terbawah mengalami peningkatan (0,45 persen) sementara pengeluaran per kapita per bulan kelompok 20 persen teratas justru berkurang (-0,24 persen).
- Menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah (kelompok 40 persen menengah). Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri yang merupakan kelompok terbesar pada kelas menengah sebagai dampak dari lebih kondusifnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terjadi peningkatan jumlah

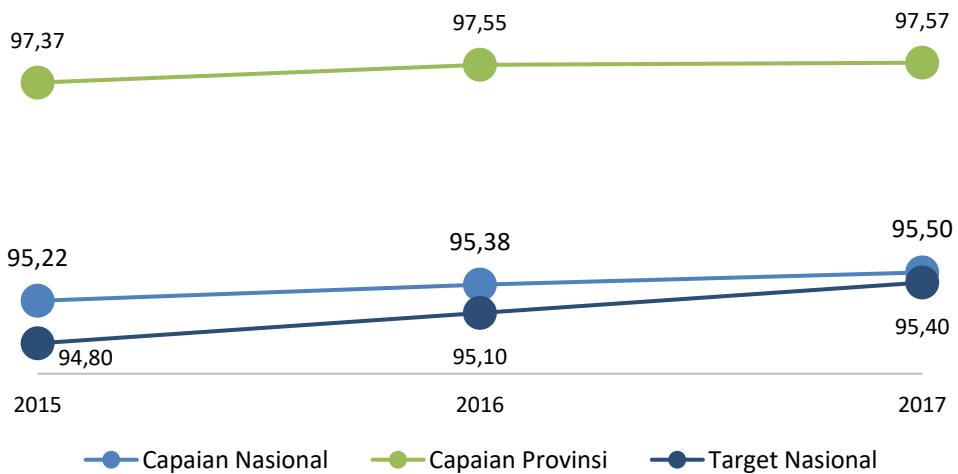
pekerja yang berusaha sendiri dari 874 ribu (Februari 2017) menjadi 918 ribu (Agustus 2017).

3.1.2. Indikator Prioritas Nasional RKP 2017

Prioritas Nasional (PN) Bidang Pendidikan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Ada keterkaitan antara kedua indikator ini, yakni peningkatan angka Harapan Lama Sekolah dalam jangka panjang akan menaikkan angka Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator Bidang Pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa dalam PN Pendidikan di Provinsi Banten sudah baik dengan tren yang membaik serta berada di atas angka nasional.

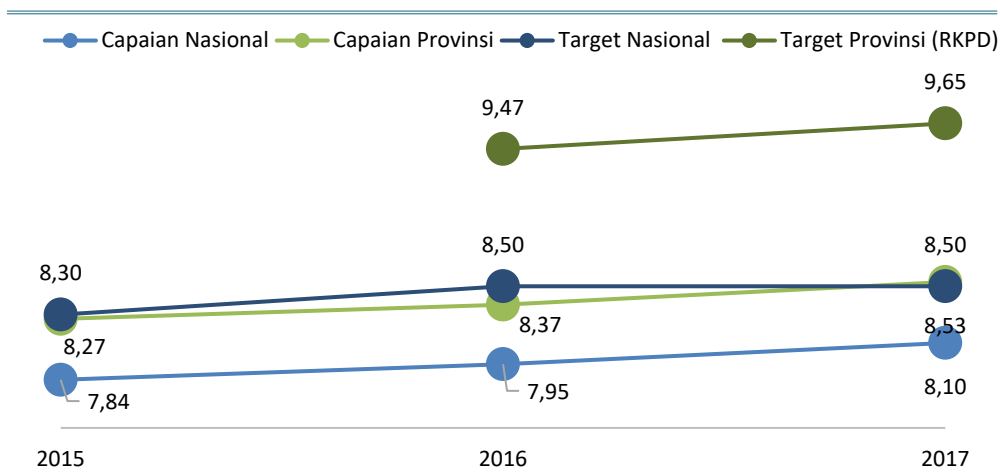
Gambar 3.16 Angka Melek Huruf Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Banten

Angka melek huruf di Provinsi Banten mencapai 97,57 persen sedikit meningkat dari tahun 2016 yaitu 97,55 persen. Angka ini juga di atas angka melek huruf nasional yang sebesar 95,5 persen pada tahun 2017. Indikator rata-rata lama sekolah Provinsi Banten meningkat dari 8,37 tahun pada 2016 menjadi 8,53 tahun pada 2017. Hal ini berarti tingkat pendidikan minimal di Provinsi Banten hampir mencapai 9 tahun atau setingkat Sekolah Menengah Pertama. Telah dilakukan pembangunan 168 unit sekolah baru untuk memperkecil jarak dari permukiman ke sekolah serta ada penggratisan pendidikan menengah.

Gambar 3.17 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Banten 2015-2017 (Tahun)



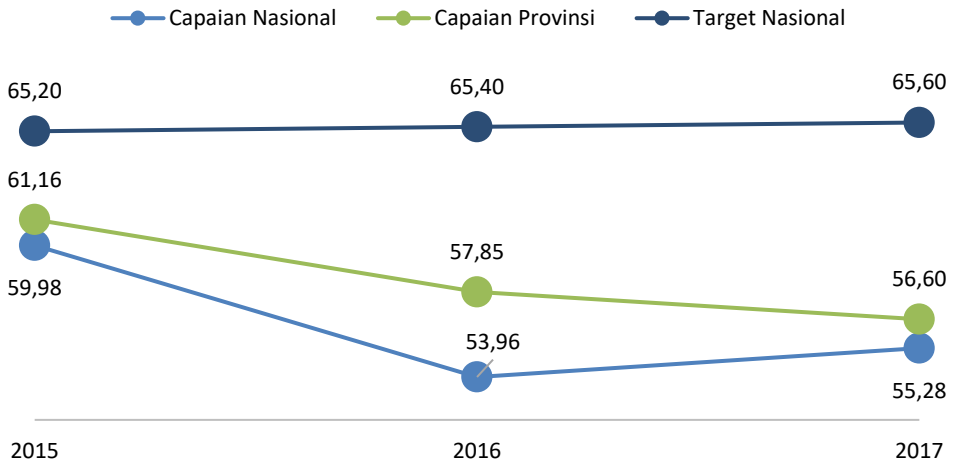
Sumber: BPS Provinsi Banten

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah juga menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan di Banten. Kondisi ini sekaligus menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang dapat bersekolah. Sayangnya, selama setahun terakhir ini peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 telah mencapai 12,78 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2017, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Prioritas Nasional Bidang Kesehatan

Dalam mengevaluasi capaian di bidang kesehatan, digunakan angka prevalensi kontrasepsi dan jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan. Provinsi Banten penurunan pada angka prevalensi kontrasepsi dari 57,85 persen pada tahun 2016 menjadi 56,60 persen pada tahun 2017. Angka ini masih berada di atas angka nasional dengan tren yang menurun, sejalan dengan angka nasional. Penurunan ini dapat diartikan sebagai menurunnya penggunaan kontrasepsi/KB pada pasangan suami-istri baik di tingkatan nasional maupun Provinsi

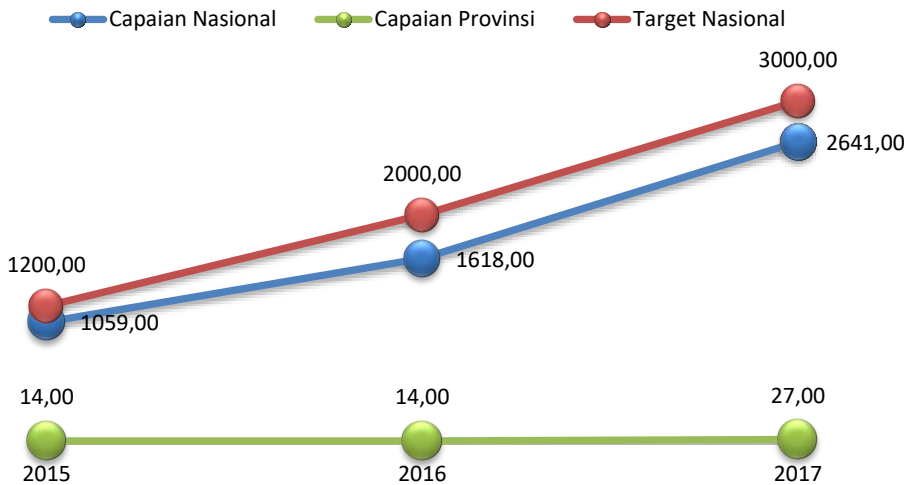
Gambar 3.18 Angka Prevelensi Kontrasepsi Suatu cara Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)



Sumber: BPS dan Kementerian Kesehatan, diolah

Jumlah puskesmas dengan minimal 5 jenis tenaga kesehatan di Provinsi Banten di tahun 2017 adalah sebanyak 27 puskesmas atau sekitar 1 puskesmas per 461.000 penduduk. Proporsi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yaitu 1 puskesmas tiap 99.164 penduduk. Walaupun ada tren peningkatan, namun peningkatan proporsi puskesmas dengan tenaga kesehatan terhadap penduduk nasional lebih cepat dibandingkan dengan di Provinsi Banten.

Gambar 3.19 Jumlah Puskesmas Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Banten 2015-2017

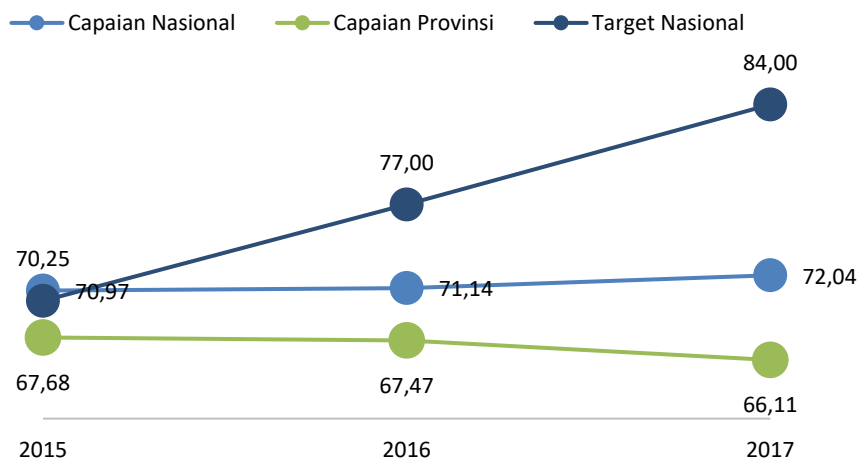


Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah

Prioritas Nasional Bidang Perumahan dan Permukiman

Indikator akses air minum layak di Provinsi Banten mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun 2017 sekitar 66,11 persen masyarakat di Provinsi Banten memiliki akses air minum yang layak atau menurun dari tahun 2016 yaitu 67,47 persen. Angka ini juga berada dibawah angka nasional yang mencapai 72,04 persen. Hal ini perlu dievaluasi mengingat Provinsi Banten memiliki tingkat ekonomi yang baik namun terjadi tren penurunan dalam hal akses air minum layak berlawanan dengan tren nasional. Dalam hal sanitasi, Provinsi Banten mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 dari 73,42persen ke 71,68 persen di tahun 2017. Walaupun angka ini masih diatas angka nasional namun kinerja pemerintah Provinsi Banten harus ditingkatkan khususnya terkait bidang perumahan dan permukiman.

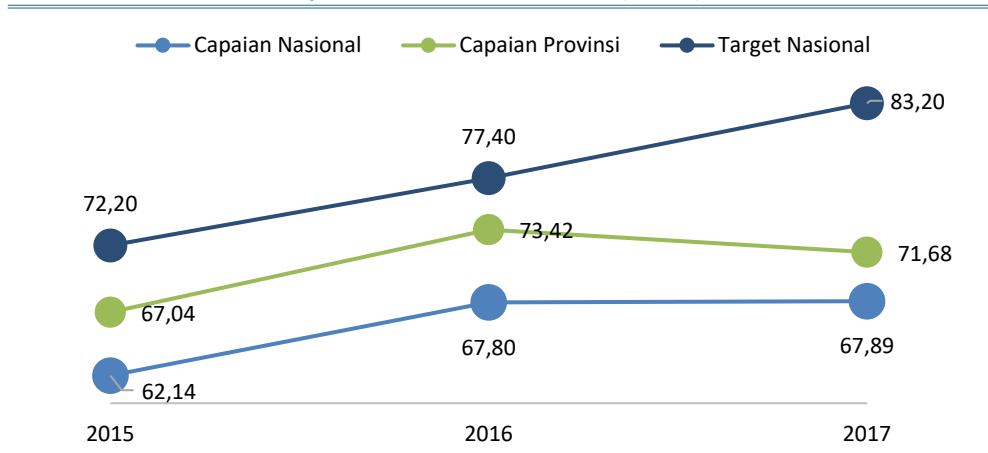
Gambar 3.20 Akses Air Minum Layak Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Banten

Mengenai akses air bersih paling lambat 2019 akan dibangun 2 waduk baru untuk perbaikan kapasitas air baku. Untuk permukiman kami juga berupaya untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RUTILAHU).

Gambar 3.21 Akses Sanitasi Layak Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)

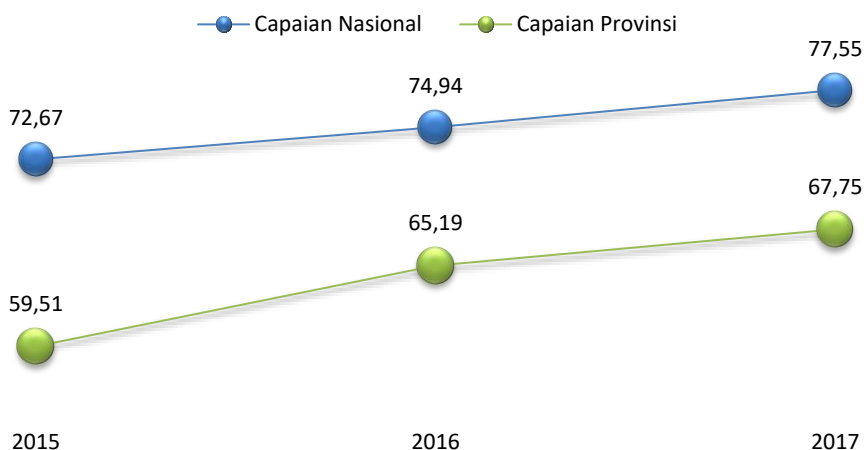


Sumber: BPS Provinsi Banten

Prioritas Nasional Bidang Antar Kelompok Pendapatan

Kepemilikan akte kelahiran pada 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah di Provinsi Banten mencapai 67,75 persen atau meningkat dari 65,19 persen di tahun 2016. Namun angka ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 77,55 persen pada tahun 2017. Mengingat masih rendahnya pencapaian ini, Pemerintah Daerah perlu melahirkan terobosan pelayanan jemput bola ke masyarakat terutama di daerah perdesaan dan wilayah 3T (terpencil, terluar, tertinggal) yang sulit terjangkau serta terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya akte dalam urusan kependudukan.

Gambar 3.22 Kepemilikan Akte (40persen) Provinsi Banten 2015-2017 (Persen)



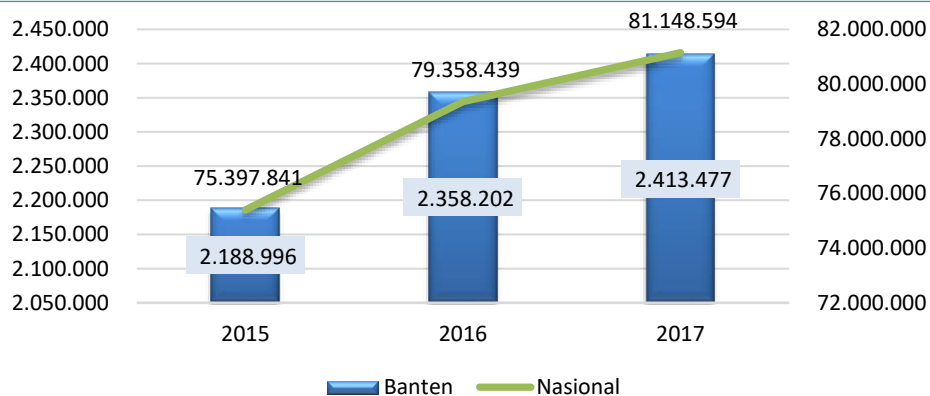
Sumber: Susenas, diolah

Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Pangan

Untuk indikator produksi daging sapi, Provinsi Banten memproduksi sebanyak 37.164 ton daging sapi atau sekitar 7,33 persen dari total produksi daging sapi nasional (50.661 ton) di tahun 2015. Apabila dibagi dengan jumlah penduduk, produksi daging sapi mencapai 3,11 kilogram per kapita atau lebih tinggi dari angka nasional yang sekitar 1,98 kilogram per kapita.

Terkait indikator produksi padi, selama periode 2015 hingga 2017 produksi padi Provinsi Banten mengalami peningkatan dari 2,19 juta ton menjadi 2,41 juta ton. Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi nasional.

Gambar 3.23 Produksi Padi Provinsi Banten 2015-2017 (Ton)

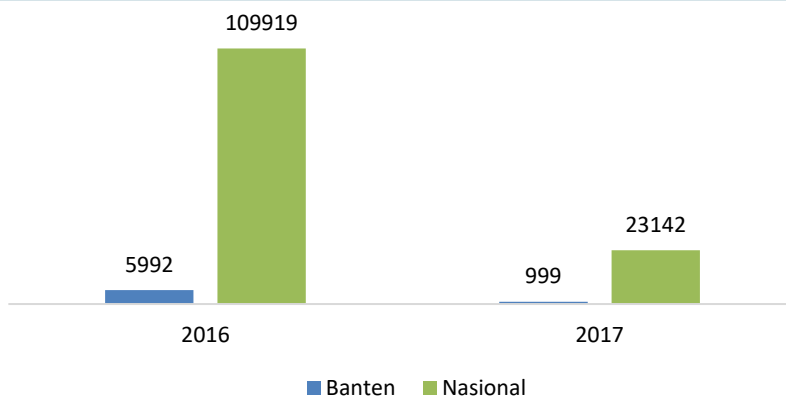


Sumber: BPS dan Kementerian Pertanian, diolah

Prioritas Nasional Bidang Reforma Agraria

Indikator redistribusi tanah di Provinsi Banten tahun 2017 mengalami penurunan signifikan sesuai dengan tren nasional atau hanya mencapai 0,04 bidang per 1000 penduduk. Sedangkan untuk pemberian sertifikat ha atas tanah, terjadi peningkatan dari 2,4 ke 13,4 per 1000 penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan tanah di Provinsi Banten harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah. Harus ada regulasi untuk meningkatkan kesadaran kepemilikan sertifikat serta meringankan biaya sertifikat yang selama ini menjadi beban dalam memperoleh hak atas tanah.

Gambar 3.24 Redistribusi Tanah Provinsi Banten 2015-2017

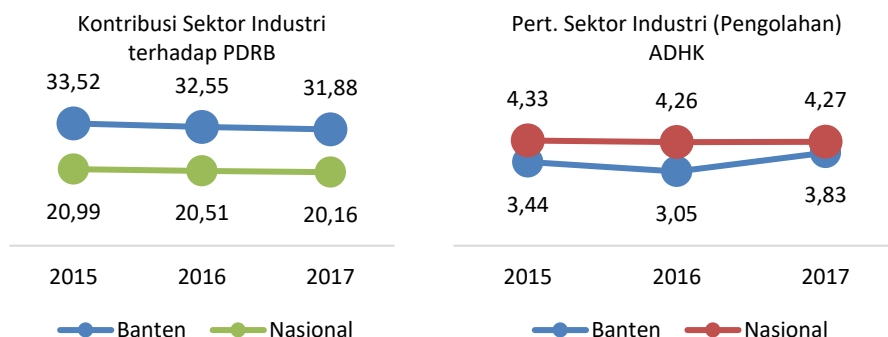


Sumber: Kementerian ATR/BPN

Prioritas Nasional Bidang Percepatan Pertumbuhan Industri

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Provinsi Banten mengalami penurunan dari 32,55 persen (2016) ke 31,88 persen (2017). Angka ini masih berada di atas angka nasional yaitu sebesar 20,16 persen pada tahun 2017. Sektor industri Provinsi Banten mengalami pertumbuhan yang signifikan mencapai 3,83 persen setelah sebelumnya tumbuh sebesar 3,05 persen pada tahun 2016. Namun angka pertumbuhan ini masih berada di bawah angka pertumbuhan sektor industri nasional yang mencapai 4,27 persen di tahun 2017.

Gambar 3.25 Capaian Indikator Industri Provinsi Banten 2015-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten

Menguatnya kondisi industri pengolahan ini sejalan dengan tumbuhnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah baik di Provinsi Banten maupun secara nasional. Selain itu, mulai solidnya perbaikan kondisi ekonomi beberapa negara mitra dagang utama juga ikut mendorong perbaikan kinerja industri pengolahan.

3.2. Analisis Relevansi

Penetapan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPDP Provinsi Banten Tahun 2018 didasarkan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDP Tahun 2017 dan capaian RPJMD Tahun 2012-2017, identifikasi isu strategis yang berkembang serta permasalahan-permasalahan mendesak tingkat nasional dan regional, kerangka ekonomi daerah, dan kerangka pendanaan tahun 2018.

Tema pembangunan daerah pada RKPDP Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti kaitannya dengan RPJPD Provinsi Banten, RPJMD Provinsi Banten, RKPDP Provinsi Banten, tematik pembangunan serta prioritas pembangunan kewilayahan yang ada pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Provinsi Banten Tahun 2018 yaitu **“Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan”**.

Setidaknya terdapat beberapa kata kunci yang menjadi makna dari tema ini, antara lain:

1. Memacu Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur kedepan diarahkan untuk membuka akses-akses kawasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di selatan Provinsi Banten untuk

menghilangkan ketimpangan antara utara dan selatan wilayah Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah Provinsi Banten melalui pengembangan sektor-sektor unggulan khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung sektor industri.

Pembangunan sektor industri di Provinsi Banten merupakan sektor strategis yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang dapat menopang sektor non bisnis lainnya. Basis yang dapat menopang sektor nonbasis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dengan terus memacu dukungan infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini sejalan dengan usaha untuk mewujudkan Provinsi Banten yang berdaya saing untuk meningkatkan investor yang berinvestasi di Provinsi Banten.

2. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan

Pembangunan yang ada saat ini masih dirasakan oleh masyarakat adanya kesenjangan antara utara dan selatan di wilayah Provinsi Banten. Untuk mengurangi kesenjangan ini pada Tahun 2018 pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial akan diarahkan ke wilayah-wilayah sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki agar dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan Provinsi Banten. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan distribusi barang dan komoditas, serta membuka aksesibilitas antar wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan di Provinsi Banten.

Tematik pembangunan Tahun 2018 dibangun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang didapatkan dari hasil Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RKPD Provinsi Banten tahun 2018 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Tematik pembangunan daerah yang disusun dalam kerangka perencanaan yang ditetapkan untuk tahun 2018 antara lain:

1. Tematik Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan;

2. Tematik Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
3. Tematik Kedaulatan Pangan; dan
4. Tematik Tata Kelola Pemerintahan.

Secara umum, dokumen RKPDP 2018 dan RPJMD Provinsi Banten sudah cukup memberikan informasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi Provinsi ini. Kedua dokumen ini juga menjelaskan berbagai rencana kebijakan dan program yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah terkait. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh Banten yaitu kesenjangan wilayah, daya saing daerah, dan tata kelola pemerintahan. Berikut penjabaran dari masing-masing permasalahan tersebut.

Kesenjangan Wilayah

Isu kesenjangan wilayah lebih terkait dengan disparitas kewilayahan dalam hal indeks pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, dan disparitas pendapatan. Fakta bahwa ada beberapa wilayah di Provinsi Banten yang secara ekonomi lebih maju daripada daerah lain, misalnya Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, membuat *gap* antarwilayah cukup mencolok. Untuk itu, pemerintah Provinsi berupaya meredam kesenjangan ini dengan menerapkan beberapa kebijakan jangka pendek dan menengah. Persoalan kesenjangan juga terkait dengan ketimpangan daya saing. Isu ini muncul karena setiap wilayah di Banten memiliki kekayaan SDA yang cukup timpang satu sama lain. Selain itu, kualitas SDM antarwilayah juga cukup timpang.

Aspek kesenjangan wilayah yang menjadi perhatian kedua Provinsi Banten diarahkan untuk mengurangi disparitas antara wilayah utara dan selatan di Banten. Daerah-daerah utara seperti Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Serang, dan Cilegon relatif jauh lebih maju secara ekonomi dibandingkan Pandeglang dan Lebak yang ada di selatan. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, misalnya, memiliki share ekonomi masing-masing 21,06 persen dan 26,26 persen pada tahun 2016. Sementara Pandeglang hanya berkontribusi sebesar 4,28 persen.

Sasaran pembangunan pemerintah Provinsi untuk mengatasi kesenjangan ini antarwilayah ini, antara lain, meningkatkan pelayanan dasar dan akses ekonomi terhadap masyarakat kurang mampu, meningkatkan daya saing tenaga kerja lewat pelatihan-pelatihan keterampilan, pembangunan perdesaan dan kawasan tertinggal, serta mendorong perbaikan kualitas fiskal di tiap wilayah. Dalam 3 tahun ke depan, Pemerintah Provinsi menargetkan perbaikan jalan lintas Provinsi harus sudah mencapai 100 persen. Sementara untuk mengurangi ketimpangan SDM, kebutuhan akan penambahan sekolah baru dan ruang kelas baru untuk pendidikan menengah akan dituntaskan dalam jangka waktu 3 tahun. Provinsi Banten juga telah

menerapkan pendidikan dan kesehatan gratis. Pemprov juga membangun pusat distribusi provinsi dalam rangka mengurangi disparitas daya beli dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah Provinsi juga telah menerapkan program pembangunan berbasis keunggulan lokal. Misalnya, pembangunan di wilayah selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak akan difokuskan pada sektor pertanian. Sementara daerah yang lebih maju seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Serang akan lebih difokuskan pada industri manufaktur dan jasa. Meskipun jumlahnya semakin mengecil, per tahun 2017, sektor pertanian mampu menyerap 676 ribu tenaga kerja. Sektor ini merupakan sektor keempat terbesar dalam hal penyerapan tenaga kerja di Banten. Tiga sektor tertinggi adalah industri (1,25 juta), perdagangan, hotel, dan restoran (1,2 juta), dan jasa kemasyarakatan (900 ribu).

Kesenjangan Daya Saing Daerah

Kesenjangan daya saing ini lebih terkait dengan perbedaan potensi antarwilayah yang ada di Provinsi Banten. Sebagai contoh, wilayah Tangerang Selatan adalah sentra ekonomi di Banten yang keberadaannya menopang Jakarta. Banyak penduduk Tangerang Selatan yang bekerja di Jakarta sehingga perputaran uang cepat terjadi di Tangerang Selatan. Sementara itu, Kota Serang adalah ibukota provinsi yang pertumbuhan ekonominya ditopang sektor perdagangan, pertanian, dan pariwisata.

Kota Cilegon adalah kota industri. Kota ini menjadi tempat memproduksi baja terbesar di Asia Tenggara, tempat dimana Kawasan Industri Krakatau Steel berada. Cilegon juga sekaligus menjadi kota energi karena keberadaan sejumlah PLTU strategis. Selain itu, karena adanya pelabuhan Merak, kota ini menjadi penghubung pulau Jawa dan Sumatera. Kota Tangerang juga memiliki keunggulan tersendiri. Tangerang merupakan salah satu pusat manufaktur di pulau Jawa dan memiliki lebih dari 1000 pabrik. Pembangunan jaringan jalan tol terus dilakukan untuk menopang penduduk komuter dari dan menuju Tangerang yang bekerja di Jakarta. Keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga turun memberi andil dalam menggerakkan roda perekonomian kota.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Banten, empat daerah ini unggul cukup jauh secara ekonomi. Bisa kita lihat, misalnya, dari indikator pengeluaran per kapita di atas. Sementara kota-kota di selatan seperti Pandeglang, masuk ke dalam kategori tertinggal – sebagaimana yang tercatat dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ini membuat daya saing antarwilayah menjadi tidak berimbang. Akibatnya adalah migrasi penduduk

antarwilayah di Provinsi Banten cukup tinggi karena penduduk di perdesaan cenderung pergi ke kota-kota yang lebih menjanjikan secara ekonomi.

Kesenjangan daya saing yang bersumber dari perbedaan karakteristik wilayah ini coba ditanggulangi dengan cara peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan di dua wilayah tertinggal, Pandeglang dan Lebak, serta perbaikan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Bentuk konkrit dari perbaikan akses dan mutu ini, misalnya, rehabilitasi sekolah dengan kondisi berat, peningkatan mutu pendidikan SMA dan SMK, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin, pengembangan RSUD, rekrutmen dokter dan tenaga medis, serta pengadaan obat dan perbekalan kesehatan *buffer stock* provinsi. Memang ini adalah tugas sulit yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dilihat hasilnya.

Dalam jangka menengah panjang, percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Karian dan Sindang Heula dan optimalisasi penggunaan infrastruktur yang telah ada seperti reaktivasi konektivitas jalur kereta Rangkasbitung-Labuan dan Saketi-Bayah, juga berpotensi mengakselerasi pengembangan pariwisata, industri dan pertanian di Banten. Selain itu, dalam rangka memperkuat daya saing Banten, perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan kualitas pasar barang melalui revitalisasi pasar rakyat serta pembangunan pasar induk maupun fasilitas pergudangan. Dalam rangka mendukung berkembangnya maritim nasional dan memanfaatkan posisi Banten yang strategis dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dapat dibangun fasilitas pelengkap lalu lintas laut.

Tata Kelola Pemerintahan

Terkait dengan visi Pemerintah Provinsi menjadikan Banten sebagai provinsi dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan program kerja yang berbasis teknologi. Diharapkan penerapan *e-government* ini dapat meminimalisir potensi korupsi serta membuat pola kerja di pemerintahan menjadi lebih efisien. Penerapan *e-government* berhubungan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam RKPD 2018, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *e-government* ini lebih kepada pembangunan *smart city*. Beberapa daerah di Banten sudah mulai pelan-pelan menerapkan *smart city* ini, diantaranya Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Inti dari penerapan *smart city* adalah pada proses pembangunan yang lebih inklusif dan efisien karena melibatkan partisipasi publik dalam mengawasi dan berkontribusi aktif di lingkungannya. Sebagai contoh, dalam aplikasi *smart city* ini, terdapat fitur-fitur untuk layanan pengaduan masyarakat, pencarian kerja, dan prosedur-prosedur perizinan yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Tantangan penerapan *smart city* ini bukan pada aplikasi teknologinya, tetapi sejauh mana masyarakat siap dan mau menggunakan aplikasi ini. Selain itu perlu pula diperhatikan kesiapan SDM Pemda apakah mampu melakukan pelayanan prima dengan adanya fitur-fitur canggih di *smart city*. Perlu pula dilihat apakah penggunaan *e-government* ini sudah disiapkan aturan-aturan pendukungnya.

**Revitalisasi Kawasan Banten Lama:
Menapak Jejak Sejarah Masa Kejayaan Kesultanan Banten
Oleh: Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si.**

Kawasan Banten lama merupakan salah satu destinasi di Provinsi Banten yang memiliki nilai penting sejarah Kesultanan Banten yang bertahan kurang lebih selama tiga abad sejak tahun 1552 hingga tahun 1813. Kawasan tersebut berlokasi sekitar 10 km dari pusat Kota Serang, ibukota Provinsi Banten, dengan jarak tempuh sekitar 20 menit dari pusat Kota Serang atau dua jam dari Jakarta.

Kawasan Banten Lama terdiri dari beberapa situs bersejarah diantaranya adalah Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, dan Masjid Agung Banten yang berada dalam kompleks istana milik Kesultanan Banten. Komplek istana tersebut dibangun oleh Sultan Pertama Banten yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati.

Kesultanan Banten mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan sultan keenam, dengan dijadikannya Banten sebagai salah satu pusat perdagangan yang disertai dengan armada laut yang sangat kuat. Namun kemudian muncul perselisihan dalam kesultanan Banten antara Sultan Ageng dengan anaknya Sultan Haji yang dimanfaatkan oleh VOC. Perselisihan tersebut terus terjadi hingga masa kesultanan berikutnya yang berakhir dengan penyerangan ke Banten dan penghancuran Keraton Surosowan oleh pasukan Daendles dan dihapuskannya Kesultanan Banten oleh kolonial Inggris pada tahun 1813.

Gambar 1. Master Plan Kawasan Banten Lama



Kawasan Banten Lama hingga saat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang datang terutama untuk berziarah ke makam para Sultan yang berada di dalam kompleks Masjid Agung. Oleh karena itu Kawasan Banten Lama saat ini lebih dikenal sebagai destinasi wisata religi dibandingkan wisata sejarah.

Revitalisasi Kawasan Banten Lama oleh Pemerintah Provinsi Banten berupa penataan tata ruang yang lebih teratur. Peningkatan Infrastruktur akses jalan ke lokasi destinasi diperlebar dan dibetonisasi. Penyediaan dan penataan lahan parkir, penerangan jalan umum (PJU) berikut rambu-rambu, serta menyiapkan moda transportasi. Pembangunan pusat oleh-oleh/jajanan pun di siapkan. Pedagang kaki lima yang ada di sekeliling Masjid Banten yang berjumlah lebih dari 400 pedagang direlokasi dan disediakan kios. Pembinaan pedagang kaki lima dilakukan untuk membangun industri ekonomi kreatif.

Penertiban lingkungan Kawasan kesultanan Banten lama pun di lakukan. Kawasan Masjid Banten Lama dibuat ruang terbuka dengan desain seperti pelasaran Masjid Nabawi di Madinah. Pengembangan wisata reilgi dan sejarah dikembangkan dengan kerjasama dengan Balai Cagar Alam untuk pengayaan koleksi Musium Banten Lama serta dikaitkan pula dengan revitalisasi Pelabuhan Karangantu sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang bisa dikembangkan di sekitar wilayah tersebut sebagai sentral kuliner seafood di Kawasan Banten Lama.

Revitalisasi juga difokuskan pada merubah budaya masyarakat dalam menyiapkan sumber daya manusianya akan sadar wisata. Keberadaan para pengemis/peminta-minta serta pengunjung dari luar daerah yang menginap di Kawasan Masjid Banten Lama, menimbulkan kekumuhan dan ketidaknyaman para wisatawan/peziarah.

Gambar 2. Kawasan Mesjid Lama Banten



Rekomendasi Kebijakan:

1. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas menuju destinasi Kawasan Banten Lama.
2. Melakukan promosi sektor pariwisata Kawasan Banten Lama yang belum dikenal wisatawan mancanegara. Sosial melalui media dan internet sebagai alternatif saluran promosi yang digunakan, mengingat porsinya yang cukup besar dalam sumber informasi wisatawan mancanegara pada saat ini.
3. Menyiapkan dan melakukan standarisasi pada jenis akomodasi *homestay* dan *guesthouse* untuk mendorong peningkatan kualitas pada kedua akomodasi tersebut.
4. Melakukan pendataan pada fasilitas pendukung destinasi Kawasan Banten Lama serta mendorong fasilitas pendukung yang memiliki kualitas yang baik.

-HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN-



4 PENUTUP

Simpulan dan Saran

Sebagai provinsi yang dekat dengan ibukota, Banten merupakan salah satu pusat industri sekaligus jasa yang berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan tingginya investasi di Provinsi Banten melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menurunkan kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, adanya ketimpangan pendapatan per kapita yang cukup signifikan antara daerah kawasan industri (Kota Cilegon) dengan nonindustri (Kabupaten Lebak dan Pandeglang) perlu diteliti lebih jauh. Penyebabnya adalah investasi yang masuk ke Provinsi Banten lebih bersifat padat modal. Ditambah lagi, adanya perbedaan faktor sosial budaya diantara kawasan tersebut.

Pencapaian kualitas SDM di Provinsi Banten harus diapresiasi karena terlihat dari indikator-indikator pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menjadi modal bagi daerah untuk pembangunan di masa depan. Kedepannya, pemerintah harus fokus pada perbaikan layanan infrastruktur dasar seperti fasilitas kesehatan, akses air bersih yang masih perlu ditingkatkan.

Dari kompleksitas masalah-masalah tersebut, diperlukan terobosan-terobosan yang harus dilakukan kebijakan terkait dengan upaya menekan disparitas pembangunan antara Banten Selatan dan Banten Utara, meningkatkan daya saing daerah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial sebagai sumber pertumbuhan baru sesuai karakteristik daerah. Banten Utara perlu fokus untuk terus memperkuat sektor industri baja, petrokimia, tekstil, alas kaki, dan agroindustri sawit yang saat ini menjadi industri strategis dan kompetitif nasional. Sementara di Banten Selatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terus mendorong perkembangan investasi di wilayah Banten Selatan. Potensi untuk investasi dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan bidang pariwisata sangat besar. Promosi investasi dengan cara menjual potensi-potensi unggulan yang ada di dua daerah tersebut seperti

pertanian, kelautan, kehutanan dan juga pariwisata, serta industri pendukungnya seperti *cold storage*, pengolahan, pengemasan dan distribusi.

2. Mendorong pengembangan sektor pertanian dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian yakni:
 - a. Memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan *corporate/cooperative farming* sehingga memacu berkembangnya agroindustri-agrobisnis yang memiliki nilai tambah.
 - b. Meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor primer yang didukung oleh asuransi pertanian dan peternakan, pemberdayaan BUMDes.
 - c. Melakukan intensifikasi pertanian dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik, dan perbaikan tata niaga pangan.
3. Mendorong pengembangan sektor pariwisata di Banten Selatan, melalui berbagai kebijakan yang perlu ditempuh meliputi:
 - a. Pengembangan destinasi desa wisata berbasis pertanian (agrowisata) dan *geopark*, serta wisata bahari yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
 - b. Integrasi dan penguatan *branding* wisata serta promosi logo Pesona Indonesia dan *Exciting Banten* dengan penguatan konektivitas digital, serta penggunaan teknologi informasi dan *e-commerce*.
 - c. Penguatan daya tarik daerah wisata melalui atraksi budaya dan aset budaya, seperti Dewi Tanjung Lesung dan Sangiang Sira.
 - d. Memperkuat kelembagaan Badan Pengelola Pariwisata dan pengembangan komunitas penyangga daerah wisata, dengan mendorong kegiatan ekonomi kreatif oleh masyarakat atau kelompok masyarakat setempat.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi potensial. Beberapa proyek yang menjadi prioritas di Banten, antara lain:
 - a. Jalan Tol Serang-Panimbang untuk mendukung KEK Tanjung Lesung
 - b. pembangunan pelabuhan wisata
 - c. peningkatan konektivitas jalan di Banten bagian selatan
 - d. perluasan ruas jalan Bayah-Cibarenok dan Cibaliung-Sumur
 - e. pengembangan kota-kota baru
5. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar publik dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta kesehatan.
6. Program-program pemerintah daerah harus lebih digalakan untuk mengentaskan kemiskinan, misalkan dalam hal investasi. Investasi yang di iijinkan hanya investasi yang bersifat *Labour intensive* bukan *Capital intensive*, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap dan pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan di Provinsi Banten.
7. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan jaminan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan.
8. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui:
 - a. Akselerasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Pemanfaatan teknologi di era digital melalui penerapan *E-Planning*, *E-Monev* dan *E-Budgeting*;
 - c. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas;
 - d. Perbaikan hubungan kerja daerah provinsi dengan kabupaten/kota.

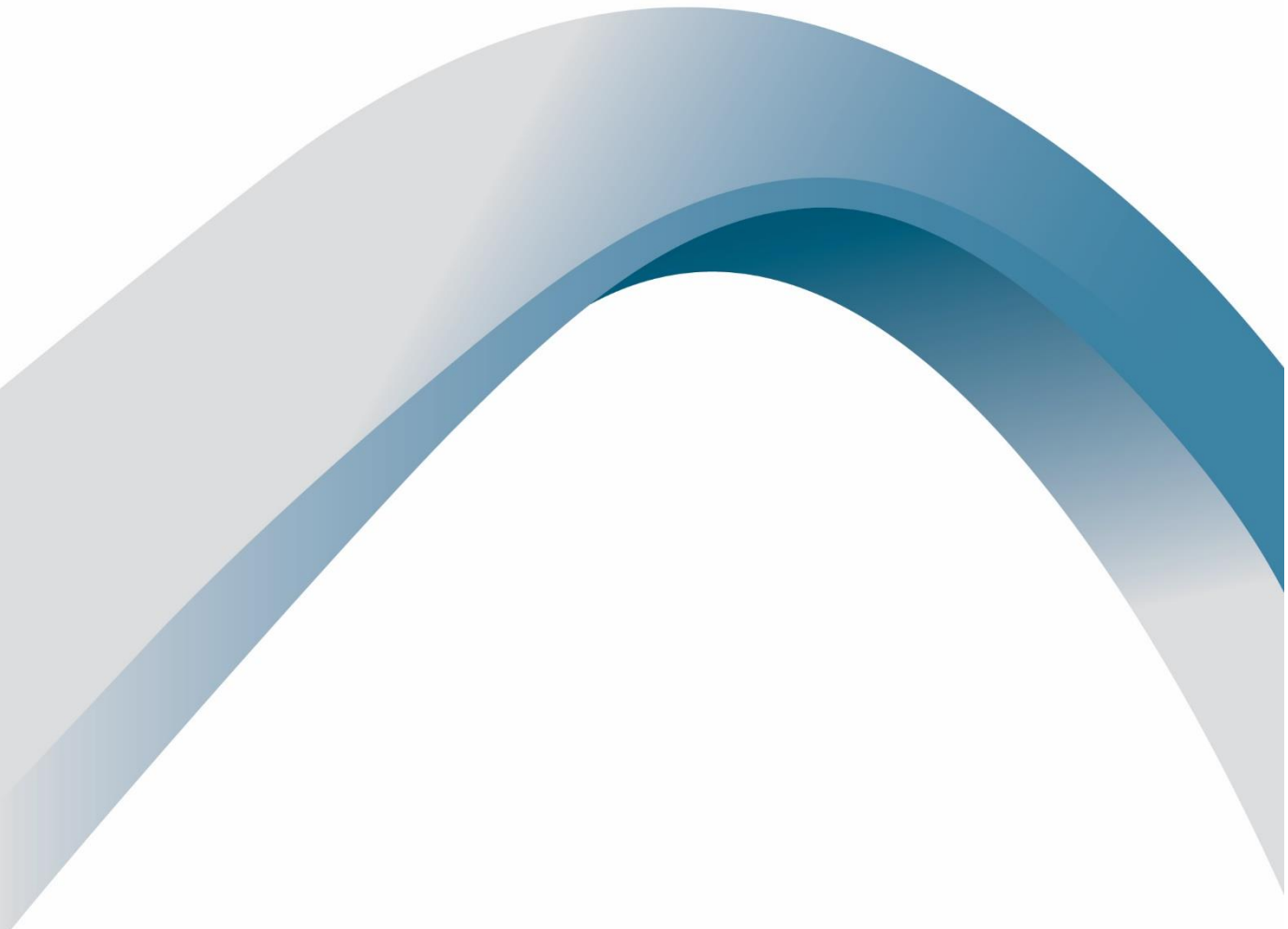


LAMPIRAN

Lampiran

Tabel Analisis Relevansi RKPD dan RPJMD

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas*	Indikator Program Prioritas
1	Kesenjangan Wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan	Pembangunan Infrastruktur wilayah, energi, dan air baku	Program pembangunan dan pengembangan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kemantapan Jalan ▪ Cakupan pelayanan air dan sanitasi
2	Daya Saing Daerah	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Program Pendidikan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rata-rata lama sekolah ▪ Harapan lama sekolah ▪ Angka Harapan Hidup
3	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas, kinerja, efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan E-Government	Program tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



EKPD

DIREKTORAT PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
DEPUTI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS